



LAPORAN TEKNIS

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau- Boo di Perairan Raja Ampat Tahun 2025

Oleh

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Dahlia G. R. Menufandu,
Arnoldus S. Ananta, Marthinus J. Rumere, Jeniffer A. Maleke,
Trigarcia M. Randa, Elfira K. Suawa, dan Kezia E. Salosso



Laporan Teknis

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat
Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau-Boo
Di Perairan Raja Ampat Tahun 2025



Oleh

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Dahlia G.R Menufandu, Arnoldus S. Ananta,
Marthinus J. Rumere, Jeniffer A. Maleke, Trigarsia M. Randa, Elfira K. Suawa dan Kezia E. Salosso

Program Sains untuk Konservasi, LPPM Universitas Papua

Laporan Teknis

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau-Boo Di Perairan Kepulauan Raja Ampat tahun 2025

Penulis

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Dahlia G.R Menufandu, Arnoldus S. Ananta, Marthinus J. Rumere, Jeniffer A. Maleke, Trigarcia M. Randa, Elfira K. Suawa, dan Kezia E. Salosso,

Program Sains untuk Konservasi LPPM Universitas Papua

Saran Sitasi

Pakiding, F., D. Matualage, D.G.R. Menufandu, A.S. Ananta, M.J. Rumere, J.A. Maleke, T.M. Randa, E.K. Suawa, dan K.E. Salosso. 2026. Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau-Boo Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Tahun 2025 (*Laporan Teknis*). Program Sains untuk Konservasi LPPM Universitas Papua, Manokwari.

Foto Sampul: Arnoldus S. Ananta (Program Sains untuk Konservasi, LPPM UNIPA)

Desain dan Tata Letak: Kezia E. Salosso (Program Sains untuk Konservasi, LPPM UNIPA)

PENGANTAR

Laporan Teknis ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Kofiau-Boo di Perairan Kepulauan Raja Ampat melalui penyediaan data dan informasi sosial ekonomi masyarakat yang berbasis hasil pemantauan lapangan. Laporan ini menyajikan kondisi terkini (status) dan tren sosial ekonomi masyarakat pesisir, meliputi aspek demografi, mata pencaharian, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penggunaan sumber daya laut, persepsi terhadap perubahan iklim dan cuaca, serta tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi.

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam, khususnya sektor pertanian dan perikanan, sebagai penopang utama penghidupan rumah tangga. Di sisi lain, partisipasi pendidikan anak usia sekolah masih tergolong baik, serta keterikatan masyarakat terhadap wilayah laut tetap tinggi, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

Namun demikian, laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian. Ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan periode sebelumnya, kepemilikan aset rumah tangga mengalami penurunan bertahap, dan akses pasar masih terbatas di beberapa kampung akibat hambatan jarak serta transportasi laut. Selain itu, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa perubahan iklim dan cuaca telah mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama kegiatan melaut dan produksi pangan rumah tangga.

Dari sisi tata kelola, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi dan aturan penangkapan ikan relatif cukup baik, namun belum merata antar kampung. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi, sosialisasi kebijakan, serta pelibatan masyarakat adat dan pemerintah kampung dalam pengelolaan kawasan secara kolaboratif.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pengelola kawasan, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Secara khusus, hasil pemantauan ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara tujuan konservasi sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Manokwari, April 2026

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau-Boo di Perairan Kepulauan Raja Ampat tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat atas dukungan kelembagaan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Kami juga berterima kasih kepada Universitas Papua, khususnya kepada Rektor (Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Prof. Dr. Ir. Freddy Pattiselano, M.Sc), dan Tim Lapangan (Agustinus Aiwor, Jelly A. Palle, dan Maria M. Bame).

Kami menghargai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, serta Pemerintah Distrik di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di tingkat lokal.

Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Pemerintah Kampung dan seluruh masyarakat kampung atas sambutan hangat dan partisipasi aktif selama proses pengumpulan data di kampung-kampung: Deer, Dibalal, Mikiran, dan Tolobi.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara sebagai administrator pendanaan bagi pelaksanaan Program Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat di Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung tahun 2025. Dukungan ini memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang mendalam dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
BAGIAN I PENDAHULUAN	5
BAGIAN II STATUS & TREN	7
Status dan Tren: Karakteristik Demografi.....	8
Populasi Umur dan Jenis Kelamin	8
Kepala Rumah Tangga.....	9
Partisipasi Sekolah	10
Agama.....	11
Suku	13
Status dan Tren: Indikator Sosial.....	14
Ketahanan Pangan Rumah Tangga.....	14
Ketahanan Pangan Anak	15
Hari Sakit atau Cedera	17
Pemberdayaan Politik: Hak Kepemilikan Laut.....	18
Budaya: Keterikatan Tempat.....	19
Status dan Tren: Karakteristik Ekonomi	21
Pekerjaan Utama	21
Aset Rumah Tangga.....	24
Status dan Tren: Penggunaan Sumberdaya Laut	25
Frekuensi Melaut	25
Frekuensi Menjual Ikan	26
Penghasilan Penangkapan Ikan	29
Akses ke Pasar.....	30
Teknik Penangkapan Ikan	31
Status: Iklim dan Cuaca.....	32
Iklim dan Cuaca	32
Status: Kesadaran akan Peraturan Pelestarian Laut.....	34
Pengenalan Istilah Kawasan Konservasi.....	34
Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan.....	35
Pendapat tentang Pengertian Kawasan Konservasi	36
Pendapat tentang Penangkapan Ikan di KKP.....	37
Letak Kampung di KKP	38
BAGIAN III REKOMENDASI KEBIJAKAN	39
DAFTAR PUSTAKA	43

Bagian I Pendahuluan

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Kofiau–Boo merupakan salah satu kawasan konservasi laut prioritas di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang terletak di jantung Bentang Laut Kepala Burung (Bird's Head Seascape/BHS). Kawasan ini merupakan KKP terbesar kedua di Raja Ampat dengan luas mencapai 137.318,73 hektar dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, didukung oleh keberadaan ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove (Veron et al., 2009; Allen & Erdmann, 2009, 2012). Berbagai ekosistem tersebut berfungsi sebagai habitat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan bagi berbagai spesies laut, termasuk spesies endemik serta komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir (Mangubhai et al., 2012). Penetapan kawasan ini sebagai KKP dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 sebagai bagian dari komitmen nasional dalam perluasan kawasan konservasi perairan. Pengelolaan KKP Kepulauan Kofiau–Boo diarahkan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penerapan sistem zonasi yang mencakup zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya secara seimbang dan berkelanjutan (<https://kkprajaampat.com/blud-uptd/>).

Dalam implementasinya, KKP Kepulauan Kofiau-Boo dikelola secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui BLUD UPTD KKPD Raja Ampat, bersama masyarakat adat dan berbagai mitra konservasi. Kendati demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, tekanan akibat pariwisata, serta keterbatasan kapasitas patroli dan pengawasan. Sejak tahun 2011, Universitas Papua (UNIPA) telah melaksanakan program pemantauan sosial ekonomi secara berkala melalui survei awal (*baseline survey*) dan monitoring berulang hingga tahun 2025. Pemantauan ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak penetapan kawasan konservasi terhadap kesejahteraan masyarakat serta untuk mendokumentasikan perubahan sosial ekonomi dari waktu ke waktu (Glew et al., 2012).

Kegiatan pemantauan tahun 2025 dilaksanakan di 4 kampung yang berada di dalam wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo. Data yang dikumpulkan meliputi aspek demografi, ketahanan pangan, kesehatan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut, serta nilai budaya, ekonomi rumah tangga, kepemilikan aset, penggunaan sumber daya laut, hingga persepsi terhadap perubahan iklim dan cuaca. Metode yang digunakan menggabungkan survei rumah tangga dan pendekatan partisipatif, sehingga informasi yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.

Laporan teknis ini menyajikan hasil analisis pemantauan sosial ekonomi tahun 2025 dengan membandingkan data dari tahun-tahun sebelumnya. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan mitra konservasi dalam merumuskan kebijakan serta program pengelolaan yang lebih adaptif dan inklusif. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi KKP Kepulauan Kofiau-Boo tidak hanya dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

A vibrant tropical scene featuring a dense grove of tall palm trees against a clear blue sky with wispy clouds. The foreground is filled with lush green vegetation. A light green rectangular overlay with rounded corners and orange decorative lines is positioned in the upper left quadrant, containing the title text.

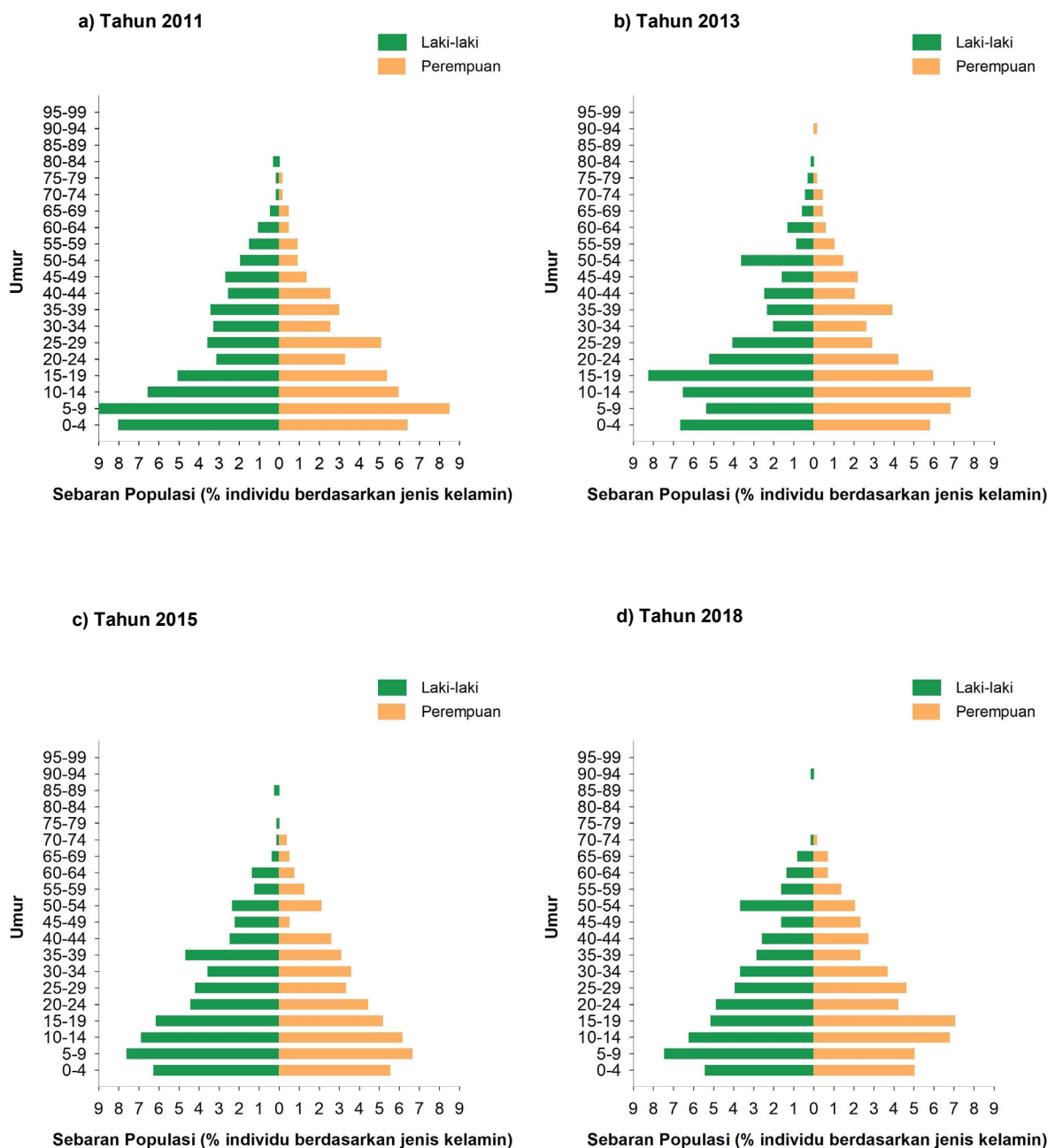
Bagian II

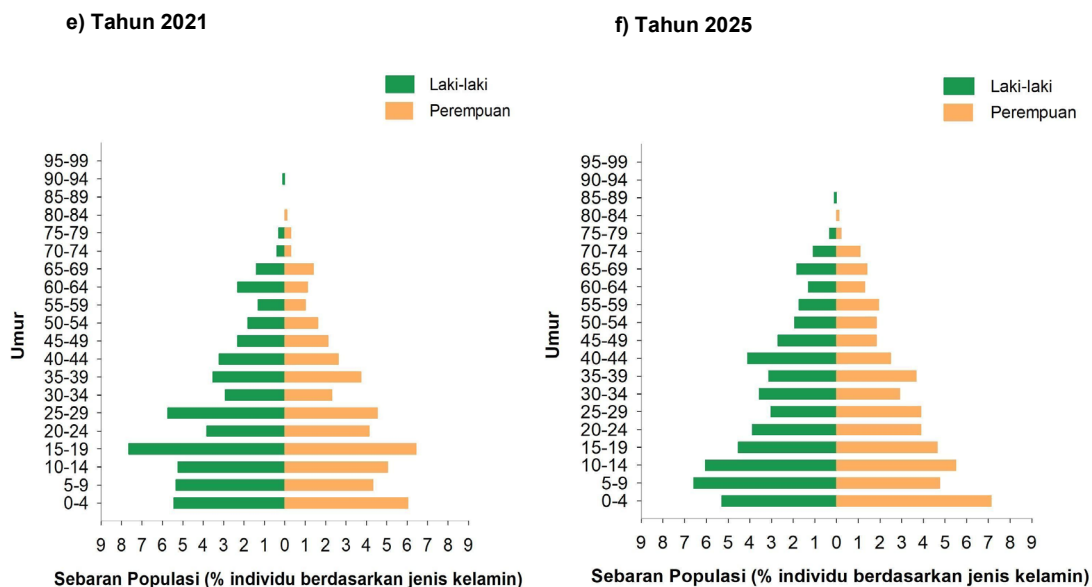
Status dan Tren

Status dan Tren: Karakteristik Demografi

Populasi Umur dan Jenis Kelamin

Usia penduduk di KKP Kepulauan Kofiau-Boo pada tahun 2025 berada pada rentang usia 0-89 tahun. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo berada dalam kelompok usia yang lebih muda. Penduduk paling banyak dijumpai pada rentang usia 0-4 tahun, yaitu berjenis kelamin Perempuan (7,13%) dan Laki-laki (5,29%). Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah laki-laki (29,91%) dan persentase relatif tidak berbeda jauh dengan penduduk usia produktif Perempuan (28,40%).



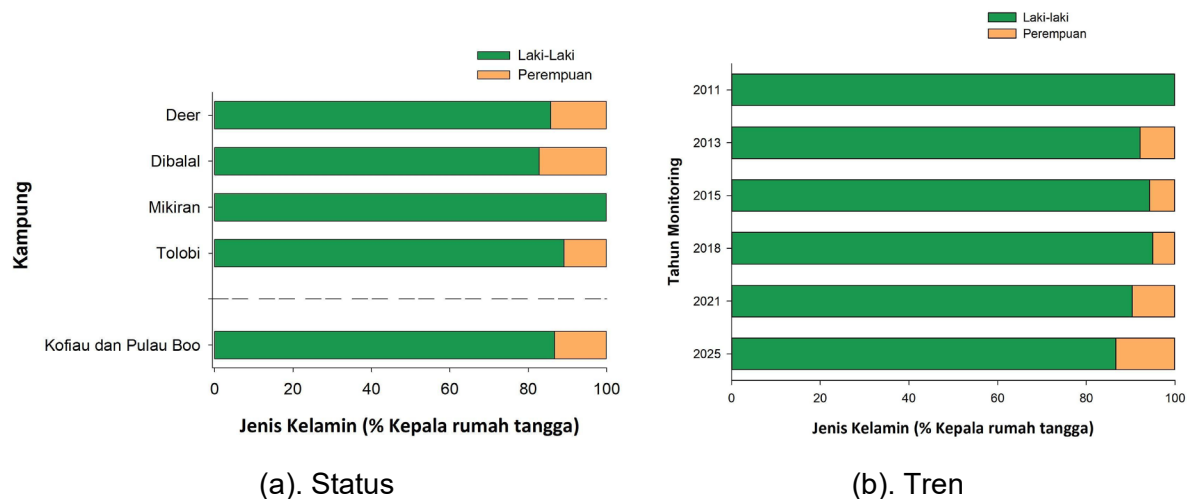


Gambar 1. Status dan Tren Populasi Umur dan Jenis Kelamin

Tren populasi umur dan jenis kelamin penduduk di kampung-kampung survei di KKP Kepulauan Kofiau-Boo relatif hampir sama sepanjang tahun monitoring. Populasi usia tahun dasar (2011) sampai dengan pengulangan keempat (tahun 2018) didominasi oleh kelompok umur anak-anak sampai usia muda (0-19 tahun). Kemudian pada tahun monitoring kelima (tahun 2021) mayoritas ditemukan pada usia muda (15-19 Tahun). Selanjutnya pada monitoring keenam (tahun 2025) sebagian besar ditemukan pada kelompok umur anak-anak sampai usia muda (0-19 Tahun).

Kepala Rumah Tangga

Monitoring pada tahun 2025 dilakukan terhadap 286 rumah tangga yang berada di KKP Kepulauan Kofiau-Boo. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, komposisi kepala rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo masih didominasi oleh laki-laki dengan rata-rata proporsi sekitar 88% dari total rumah tangga yang disurvei di tingkat kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan rumah tangga di sebagian besar kampung masih berada pada laki-laki. Variasi antar kampung terlihat relatif kecil, di mana Kampung Mikiran menunjukkan seluruh kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki (100%). Kampung Tolobi dan Deer juga menunjukkan dominasi kepala rumah tangga laki-laki dengan proporsi masing-masing sekitar 89,09% dan 85,71%. Sementara itu, Kampung Dibalal mencatat proporsi kepala rumah tangga perempuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kampung lainnya, yaitu sekitar 17,24%. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun laki-laki masih menjadi kepala rumah tangga utama di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo, perempuan juga memiliki peran sebagai kepala rumah tangga di beberapa kampung.



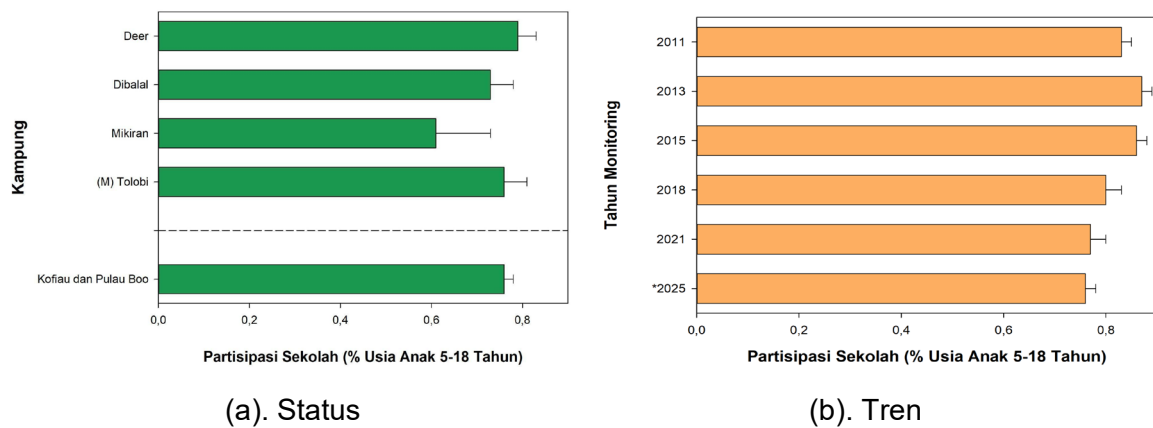
Gambar 2. Status dan Tren Kepala Rumah Tangga

Analisis tren sejak tahun dasar 2011 hingga 2025 menunjukkan bahwa komposisi kepala rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo masih didominasi oleh laki-laki sepanjang periode pemantauan. Pada awal pemantauan tahun 2011, seluruh kepala rumah tangga tercatat berjenis kelamin laki-laki (100%). Pada periode berikutnya mulai terlihat keberadaan kepala rumah tangga perempuan, yaitu sekitar 7,86% pada tahun 2013. Proporsi tersebut kemudian sedikit menurun pada tahun 2015 (5,76%) dan 2018 (5,04%). Memasuki tahun 2021, proporsi kepala rumah tangga perempuan kembali meningkat menjadi sekitar 9,63%, dan terus meningkat hingga mencapai sekitar 13,33% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan bertahap pada jumlah kepala rumah tangga perempuan di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo, meskipun kepala rumah tangga laki-laki masih tetap menjadi kelompok yang dominan.

Partisipasi Sekolah

Hasil analisis data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia 5–18 tahun di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo tergolong cukup tinggi dengan rata-rata kawasan sekitar 75%. Variasi antar kampung masih terlihat ($p\text{-value} = 0,03$) meskipun tidak terlalu besar. Kampung Deer mencatat tingkat partisipasi sekolah tertinggi dengan sekitar 79%, diikuti oleh Kampung Tolobi (76%) dan Dibalal (73%). Sementara itu, Kampung Mikiran menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang relatif lebih rendah dibandingkan kampung lainnya, yaitu sekitar 61%. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan di masing-masing kampung. Sekolah dasar (SD) tersedia di seluruh kampung, sementara sekolah menengah pertama (SMP) terdapat di Deer, Dibalal, dan Tolobi, dan sekolah menengah atas (SMA) hanya tersedia di Kampung Deer. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagian anak dari wilayah ini melanjutkan studi ke Kota Sorong maupun ke luar Papua dengan dukungan program beasiswa. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo telah

tersedia di seluruh kampung, namun akses ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih memerlukan mobilitas ke wilayah lain.



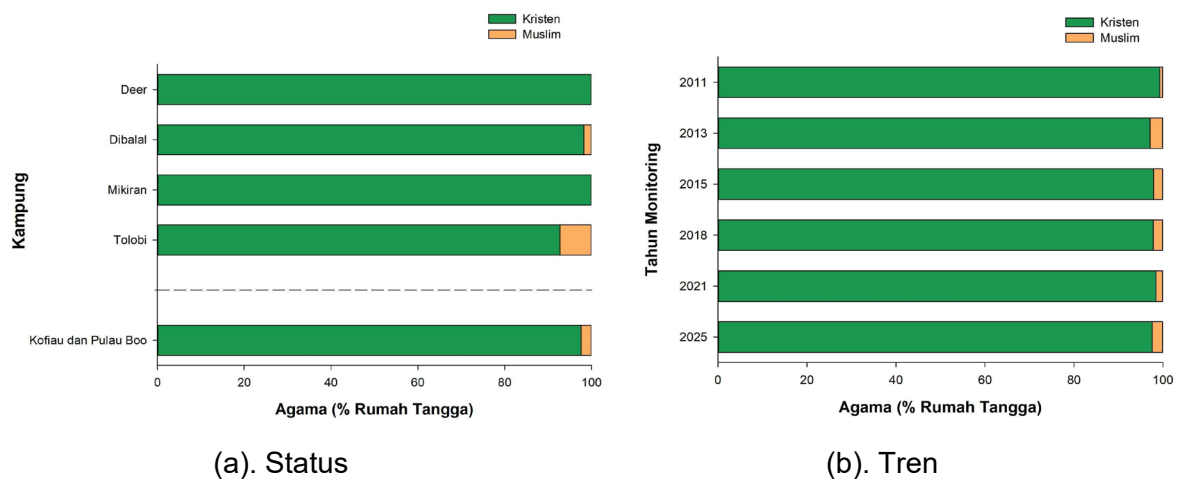
Gambar 3. Status dan Tren Partisipasi Sekolah Usia Anak

Perbandingan data antar tahun pemantauan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia 5–18 tahun di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo cenderung mengalami sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun secara umum masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Pada awal pemantauan tahun 2011, tingkat partisipasi sekolah tercatat sekitar 83%, kemudian meningkat menjadi sekitar 87% pada tahun 2013 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2015 dengan sekitar 86%. Setelah periode tersebut, tingkat partisipasi sekolah mulai menunjukkan penurunan bertahap menjadi sekitar 80% pada tahun 2018, kemudian menurun lagi menjadi sekitar 77% pada tahun 2021, dan mencapai sekitar 76% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo masih mengikuti pendidikan formal, meskipun tingkat partisipasi sekolah mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode awal pemantauan. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah tangga, jumlah anggota keluarga, serta berkurangnya proporsi anak usia sekolah pada saat pendataan dilakukan. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan untuk menjaga akses, keberlanjutan, dan partisipasi pendidikan bagi anak-anak di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo.

Agama

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, komposisi agama rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo didominasi oleh agama Kristen dengan proporsi yang sangat tinggi di hampir seluruh kampung yang disurvei. Kampung Deer dan Mikiran tercatat seluruh rumah tangganya beragama Kristen (100%). Kampung Dibalal juga menunjukkan dominasi agama Kristen yang sangat tinggi dengan sekitar 98,28% rumah tangga beragama Kristen dan sekitar 1,72% beragama Islam. Sementara itu, Kampung Tolobi memiliki proporsi rumah tangga beragama Kristen sekitar 92,73% dan sekitar 7,27% beragama Islam. Keberadaan rumah

tangga beragama Islam di wilayah ini umumnya berasal dari masyarakat pendatang dari luar Papua, seperti dari Buton dan Halmahera, yang bekerja sebagai pedagang, pengepul atau penadah hasil laut. Di Kampung Tolobi, misalnya, beberapa rumah tangga beragama Islam diketahui berprofesi sebagai penadah ikan, penadah kopra, serta pedagang yang terlibat dalam kegiatan perdagangan lokal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur agama rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo relatif homogen dengan dominasi agama Kristen, sementara agama Islam hadir dalam proporsi yang lebih kecil sebagai bagian dari dinamika ekonomi dan mobilitas penduduk di wilayah pesisir.

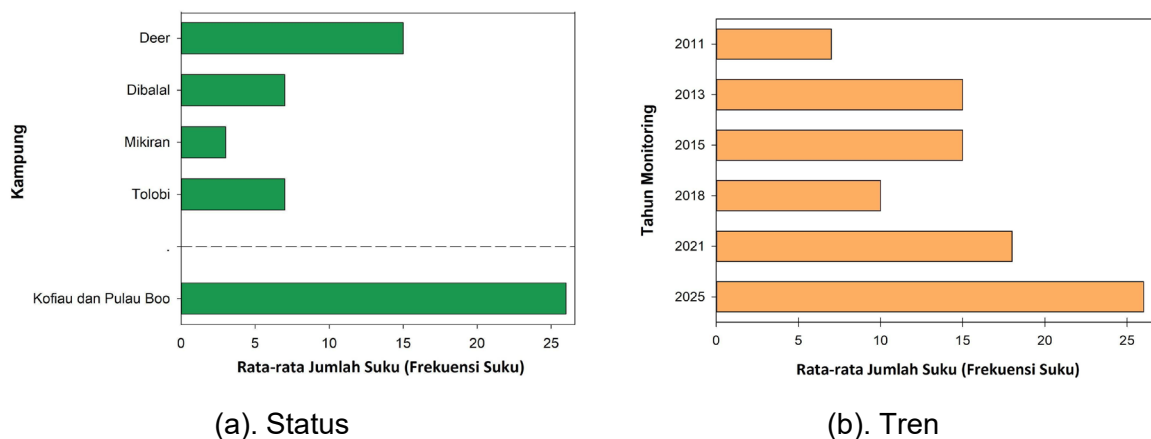


Gambar 4. Status dan Tren Agama

Sepanjang periode pemantauan tahun, komposisi agama rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo relatif stabil sepanjang periode pemantauan. Sejak awal pemantauan, agama Kristen secara konsisten menjadi agama yang dianut oleh hampir seluruh rumah tangga di wilayah ini. Pada tahun 2011, proporsi rumah tangga beragama Kristen tercatat sekitar 99,28%, sementara rumah tangga beragama Islam sekitar 0,72%. Pada periode berikutnya, proporsi rumah tangga beragama Islam meningkat menjadi sekitar 2,88% pada tahun 2013, kemudian sedikit menurun pada tahun 2015 (2,13%) dan relatif stabil pada tahun 2018 (2,16%). Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga beragama Islam tercatat sekitar 1,59%, dan kembali meningkat menjadi sekitar 2,38% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa struktur agama masyarakat di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo cenderung stabil dengan dominasi agama Kristen, sementara agama Islam tetap hadir dalam proporsi yang kecil dan umumnya berkaitan dengan keberadaan masyarakat pendatang yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan pengumpulan hasil laut di beberapa kampung.

Suku

Terdapat variasi kondisi keragaman suku yang cukup jelas antar kampung pada pemantauan tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata jumlah suku yang tercatat berkisar antara 3 hingga 15 suku. Kampung Deer mencatat jumlah suku tertinggi dengan sekitar 15 suku, sementara Kampung Dibalal dan Tolobi masing-masing sekitar 7 suku, dan Kampung Mikiran memiliki jumlah suku yang lebih sedikit yaitu sekitar 3 suku. Suku yang paling dominan ditemukan di wilayah ini adalah Suku Betew, diikuti oleh Suku Beser, serta sebagian responden yang mengidentifikasi diri sebagai Suku Biak Raja Ampat. Selain itu, terdapat pula beberapa suku lain yang berasal dari luar wilayah setempat seperti Biak, Flores, Ambon, dan Buton, serta sebagian kecil dari daerah lain di Indonesia. Tingginya keragaman suku di Kampung Deer berkaitan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih besar serta mobilitas masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan kampung lainnya. Kehadiran masyarakat dari berbagai latar belakang suku ini umumnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik seperti guru, tenaga kesehatan, pegawai distrik, pedagang, maupun nelayan.



Gambar 5. Status dan Tren Suku

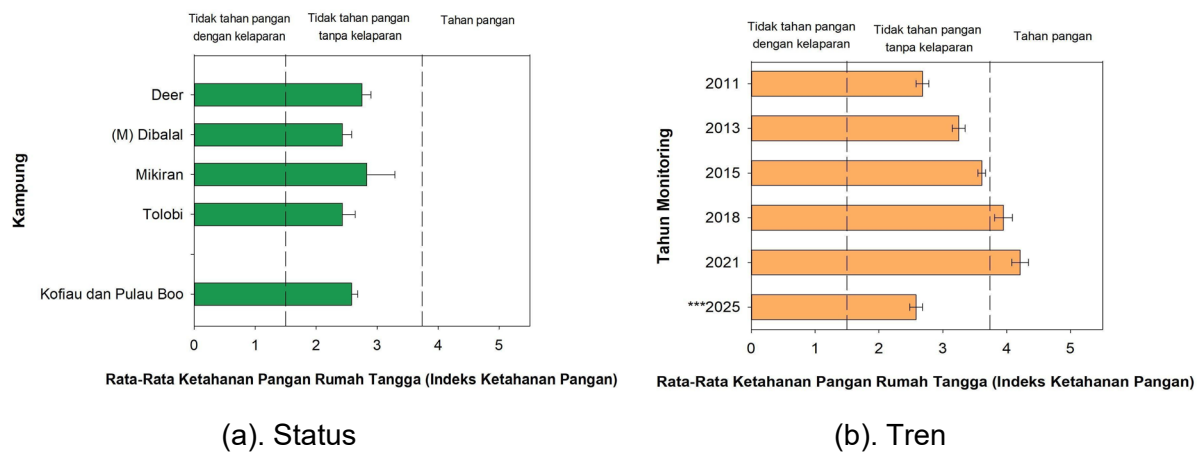
Sepanjang periode pemantauan, indikator Keragaman Suku di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal pemantauan tahun 2011, rata-rata jumlah suku yang tercatat sekitar 7 suku, kemudian meningkat menjadi sekitar 15 suku pada tahun 2013 dan relatif stabil pada tahun 2015 dengan jumlah yang hampir sama. Pada periode berikutnya, jumlah suku sempat menurun menjadi sekitar 10 suku pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2021 jumlah suku kembali meningkat menjadi sekitar 18 suku, dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 dengan sekitar 26 suku yang tercatat. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa keragaman suku di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo cenderung meningkat dari waktu ke waktu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh mobilitas penduduk serta kedatangan masyarakat dari berbagai daerah yang bekerja di sektor pemerintahan, perdagangan, maupun perikanan di wilayah tersebut.

Status dan Tren: Indikator Sosial

Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya lokal (Bickel et al., 2000). Sebaliknya, ketidaktahanan pangan menggambarkan kondisi ketika rumah tangga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pangan yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko penyakit menular serta berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak-anak. Dalam survei ini digunakan tiga skala ketahanan pangan rumah tangga sebagaimana dirumuskan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (Bickel et al., 2000), yaitu: (1) tahan pangan, (2) tidak tahan pangan tanpa kelaparan, dan (3) tidak tahan pangan dengan kelaparan.

Secara umum, status ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo pada tahun 2025 berada pada kategori tidak tahan pangan tanpa kelaparan, dengan nilai rata-rata indeks ketahanan pangan kawasan sekitar 2,58. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara konsisten, meskipun kondisi kelaparan berat relatif jarang terjadi. Variasi antar kampung terlihat pada nilai indeks yang dilaporkan, di mana Mikiran (2,83) dan Deer (2,75) menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan Dibalal dan Tolobi (2,43). Secara umum, sumber pangan utama masyarakat berasal dari hasil kebun seperti ubi-ubian (singkong, keladi, ubi jalar) dan pisang, dengan pola kebun yang umumnya berupa kebun campuran (*mixed garden*) dan sebagian besar dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu, beras menjadi sumber pangan penting yang biasanya dibeli di pasar kampung atau di Sorong, sehingga ketersediaannya sangat bergantung pada kemampuan rumah tangga untuk membeli. Ketersediaan bahan pangan dari kebun dan hasil laut juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, karena banyak kebun masyarakat berada di pulau-pulau sekitar sehingga ketika cuaca buruk akses ke kebun dan sumber pangan menjadi lebih terbatas. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian rumah tangga masih melakukan berbagai penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pangan, seperti memilih jenis makanan yang lebih sederhana atau mengurangi kualitas makanan yang dikonsumsi ketika menghadapi keterbatasan ekonomi.



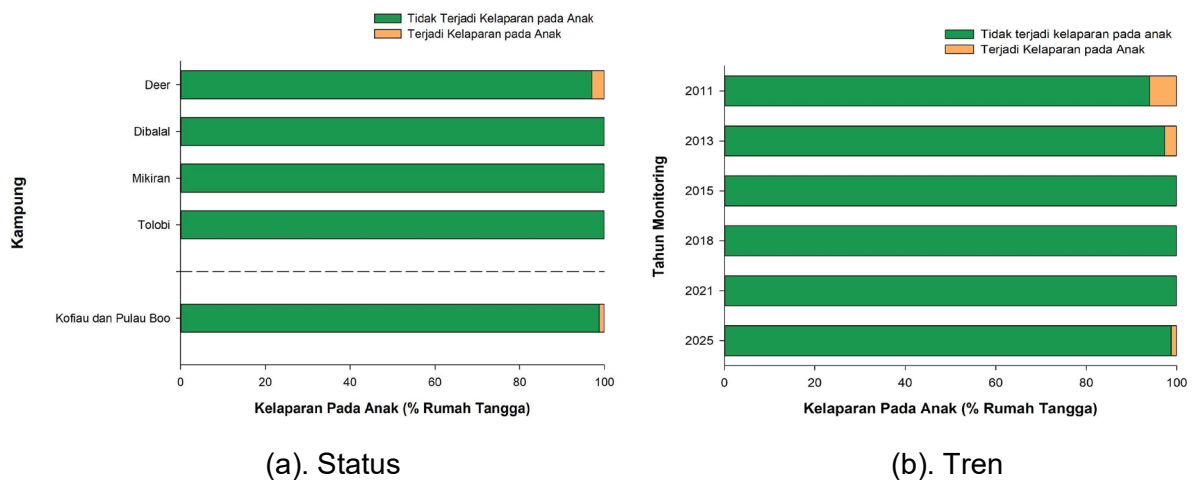
Gambar 5. Status dan Tren Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Perbandingan data antar periode pemantauan menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2011, nilai indeks ketahanan pangan tercatat sekitar 2,68, kemudian meningkat pada tahun 2013 (3,25) dan 2015 (3,61), serta mencapai nilai yang lebih tinggi pada tahun 2018 (3,95) dan 2021 (4,21) yang mendekati kategori tahan pangan. Namun, pada tahun 2025 nilai indeks kembali menurun menjadi sekitar 2,58, yang menunjukkan meningkatnya kerentanan pangan pada sebagian rumah tangga. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketergantungan terhadap bahan makanan yang sebagian didatangkan dari luar kampung seperti Sorong dan Halmahera, lokasi kebun masyarakat yang berada di pulau lain seperti Mikiran dan Pulau Boo, serta keterbatasan kemampuan rumah tangga dalam membeli bahan makanan pokok seperti beras. Selain itu, jumlah anggota keluarga yang cukup besar dan tingginya kebutuhan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk pendidikan anak, juga mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kondisi yang relatif lebih baik pada tahun 2021 kemungkinan berkaitan dengan adanya bantuan bahan makanan dan bantuan tunai selama masa pandemi COVID-19.

Ketahanan Pangan Anak

Ketahanan pangan pada anak-anak merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga, karena anak-anak yang pertama akan menjadi rentan kekurangan gizi dalam rumah tangga (Martorell, 1995). Ketahanan pangan sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Anak-anak yang mengalami kerawanan pangan dapat beresiko lebih besar mengalami defisiensi nutrisi yang terkait dengan masalah perkembangan fisik dan mental (Casey et al, 2005). Status ketahanan pangan anak-anak dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) menggunakan klasifikasi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, yaitu tidak ada bukti kelaparan pada anak dan terdapat bukti kelaparan pada anak.

Gambaran kondisi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ketahanan pangan pada anak di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo secara umum berada pada kategori tidak terjadi kelaparan pada anak di sebagian besar rumah tangga. Data menunjukkan bahwa di kampung Tolobi, Mikiran, dan Dibalal, seluruh rumah tangga (100%) melaporkan tidak adanya kejadian kelaparan pada anak dalam periode pengamatan. Sementara itu, di kampung Deer sebagian besar rumah tangga juga melaporkan kondisi yang sama, dengan sekitar 97,06% rumah tangga tidak mengalami kelaparan pada anak, sementara sekitar 2,94% rumah tangga melaporkan adanya kejadian kelaparan pada anak. Kondisi di Deer ini kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga yang relatif lebih besar dibandingkan kampung lainnya, serta banyaknya keluarga baru atau rumah tangga dengan orang tua muda yang masih dalam tahap membangun kestabilan ekonomi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian rumah tangga masih menghadapi keterbatasan dalam ketahanan pangan, kondisi tersebut umumnya belum sampai menyebabkan kelaparan pada anak di sebagian besar rumah tangga di wilayah ini.



Gambar 6. Status dan Tren Ketahanan Pangan Anak

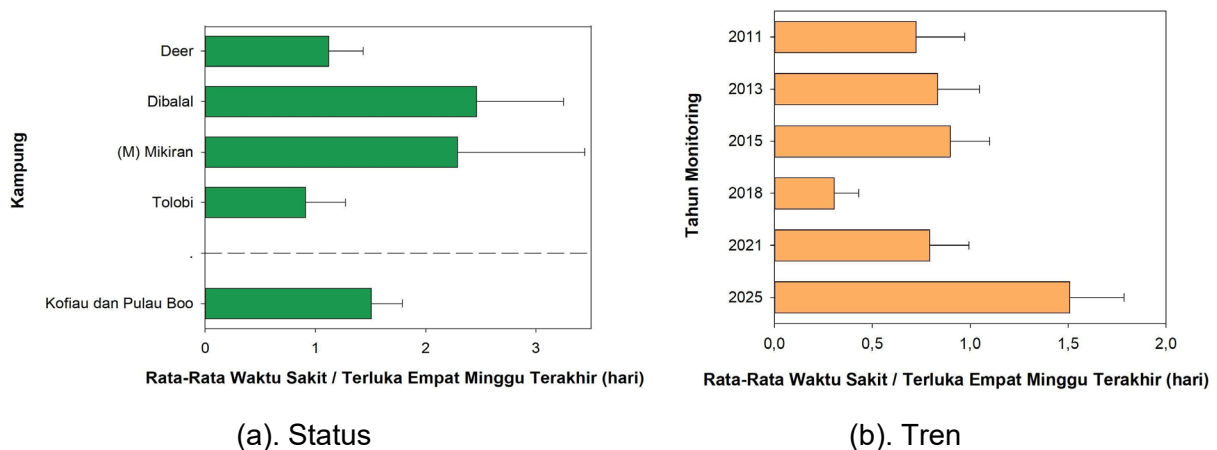
Analisis tren sejak tahun dasar 2011 hingga 2025 menunjukkan bahwa kejadian kelaparan pada anak di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo secara umum relatif rendah dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, sekitar 6,03% rumah tangga melaporkan adanya kejadian kelaparan pada anak, sementara 93,97% rumah tangga menyatakan tidak mengalami kondisi tersebut. Persentase ini kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi sekitar 2,68%, dan sejak tahun 2015 hingga 2021 hampir seluruh rumah tangga melaporkan tidak adanya kejadian kelaparan pada anak (100%). Pada tahun 2025, kejadian kelaparan pada anak kembali tercatat namun dalam proporsi yang sangat kecil yaitu sekitar 1,23%, sementara 98,77% rumah tangga tetap melaporkan tidak adanya kelaparan pada anak. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan pada anak di wilayah ini relatif stabil dan cukup baik, meskipun sebagian kecil rumah tangga masih

menghadapi kerentanan ekonomi yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

Hari Sakit atau Cedera

Untuk mengevaluasi penyakit atau sakit yang dialami oleh setiap anggota rumah tangga yang tersampel, maka setiap rumah tangga yang disurvei ditanyakan “*apakah terdapat anggota rumah tangga yang menderita sakit atau cedera selama 4 minggu terakhir?*” Jumlah hari sakit atau cedera untuk semua individu dalam rumah tangga kemudian dijumlahkan. Batas maksimum hari sakit dalam penelitian ini adalah 28 hari atau empat (4) minggu.

Hasil pemantauan tahun 2025 ditemukan bahwa rata-rata jumlah hari rumah tangga mengalami sakit atau cedera dalam empat minggu terakhir di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo tergolong relatif rendah. Secara umum, rata-rata waktu sakit di tingkat kawasan tercatat sekitar 1,7 hari dalam satu bulan terakhir. Variasi antar kampung terlihat pada nilai rata-rata hari sakit yang dilaporkan oleh rumah tangga, di mana Dibalal mencatat nilai tertinggi sekitar 2,46 hari, diikuti oleh Mikiran sekitar 2,29 hari, sementara Deer (1,12 hari) dan Tolobi (0,91 hari) memiliki rata-rata waktu sakit yang lebih rendah. Jenis penyakit yang paling umum dialami rumah tangga antara lain batuk dan flu, demam, sakit kepala, asam urat, serta hipertensi. Dalam praktiknya, Puskesmas Mikiran menjadi fasilitas kesehatan yang paling sering dimanfaatkan masyarakat, termasuk melalui program puskesmas keliling yang dilakukan setiap bulan. Untuk penyakit ringan, sebagian masyarakat biasanya membeli obat di kios kampung atau menggunakan obat kampung, seperti ramuan tradisional dari bahan alami (kulit kayu atau daun-daunan). Sementara itu, untuk penyakit yang lebih serius masyarakat umumnya dirujuk atau memilih berobat ke Kota Sorong. Secara umum, kombinasi antara layanan kesehatan formal dan penggunaan pengobatan tradisional masih menjadi bagian dari strategi masyarakat dalam menangani masalah kesehatan sehari-hari.



Gambar 7. Status dan Tren Rata-Rata Hari Sakit atau Cedera

Selama periode pemantauan dari tahun 2011 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah hari rumah tangga mengalami sakit atau cedera dalam empat minggu terakhir di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, rata-rata waktu sakit tercatat sekitar 0,72 hari, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2013 menjadi sekitar 0,83 hari dan mencapai 0,90 hari pada tahun 2015. Pada tahun 2018, rata-rata hari sakit menurun cukup signifikan menjadi sekitar 0,31 hari, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 0,79 hari. Pada tahun 2025, nilai tersebut meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 1,51 hari, yang menunjukkan adanya peningkatan kejadian sakit atau cedera yang dialami rumah tangga dalam periode tersebut. Secara umum, perubahan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi kesehatan masyarakat, faktor usia, serta jenis penyakit yang umum terjadi seperti demam, batuk dan flu, ISPA, atau keluhan kesehatan lainnya yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Selain itu, akses layanan kesehatan melalui puskesmas dan program puskesmas keliling juga berperan dalam penanganan penyakit di tingkat kampung.

Pemberdayaan Politik: Hak Kepemilikan Laut

Hak Kepemilikan Laut (*Marine Tenure Rights*) adalah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah perairan laut yang mempengaruhi kehidupan mereka (United Nations Development Program et al. 1990). Kepemilikan laut merupakan dasar budaya dan hukum dari pengendalian sumberdaya laut lokal yang telah dikaitkan dengan manfaat sosial dan ekologi (Cinner, 2005). Survei ini mendokumentasikan kepemilikan laut rumah tangga sebagai jumlah hak milik yang terpisah (misalnya, hak untuk mengakses, memanen, mengelola sumber daya laut, dan membuat keputusan) yang dilaksanakan oleh rata-rata rumah tangga di KKP dalam 12 bulan sebelum survei. Indeks kepemilikan laut dihitung berdasarkan serangkaian pertanyaan dalam survei rumah tangga yang mendokumentasikan partisipasi rumah tangga dalam tata kelola sumber daya laut, dengan kisaran skor mulai dari 0 hingga 5.

Hasil survei tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata indeks hak kepemilikan laut oleh rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki akses dan keterlibatan yang cukup kuat dalam pemanfaatan sumber daya laut. Secara umum, nilai indeks di tingkat kawasan berada pada kisaran sekitar 2,5, yang menunjukkan bahwa rumah tangga rata-rata memiliki sekitar tiga jenis hak utama terkait pemanfaatan laut. Variasi antar kampung terlihat pada nilai indeks yang dilaporkan oleh rumah tangga. Kampung Tolobi mencatat nilai tertinggi sekitar 2,69, diikuti oleh Mikiran sekitar 2,62, sementara Dibalal dan Deer memiliki nilai yang sedikit lebih rendah yaitu masing-masing sekitar 2,36 dan 2,25. Hak yang paling umum dimiliki masyarakat meliputi hak untuk masuk ke wilayah laut, hak untuk mengambil atau memanen sumber daya laut, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan kawasan melalui lembaga pengelola seperti BLUD UPTD Raja

Ampat, yang berperan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah tersebut.



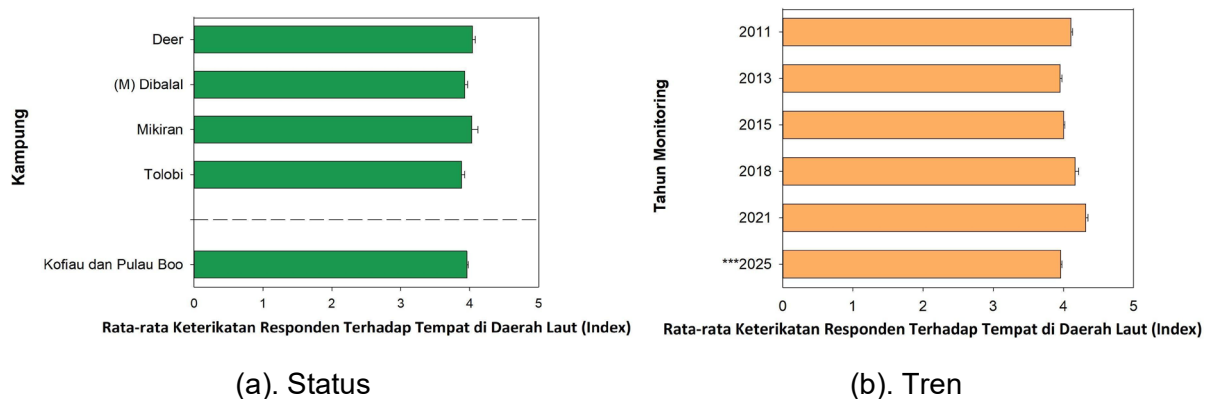
Gambar 8. Status dan Tren Hak Kepemilikan Laut Rumah Tangga

Nilai indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan (pola fluktuatif) antar periode survei. Pada tahun 2011, nilai indeks tercatat sekitar 2,83, kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi sekitar 2,56 dan kembali turun pada tahun 2015 (2,10) serta tahun 2018 (1,95). Pada periode berikutnya, nilai indeks kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,13, dan terus meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai sekitar 2,42. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada beberapa periode pemantauan, keterlibatan dan hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh mata pencaharian utama masyarakat yang bergantung pada kegiatan melaut, keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan pengelolaan laut, serta dukungan berbagai lembaga dan organisasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, kedudukan masyarakat sebagai pemilik wilayah atau tempat secara adat juga turut memperkuat peran mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut di sekitar kampung.

Budaya: Keterikatan Tempat

Keterikatan terhadap tempat yang dimaksud adalah hubungan emosional antara individu dan lingkungan laut masing-masing (Williams dan Vaske, 2003). Untuk mengukur seberapa kuat hubungan emosi antara individu yang berada di sekitar lingkungan laut dan lingkungannya, dilakukan studi dengan menggunakan indeks keterikatan emosi antara individu dan wilayah perairannya (*Place Attachment Index*) yang nilainya berkisar antara 0 sampai 5. Nilai 5 menunjukkan adanya hubungan emosi yang sangat kuat antara individu dan lingkungan laut di sekitarnya.

Hasil analisis data tahun 2025 memperlihatkan bahwa tingkat keterikatan emosional responden terhadap wilayah perairan laut di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata indeks kawasan sekitar 4,0. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah laut di sekitar kampung mereka. Variasi antar kampung terlihat pada nilai indeks yang dilaporkan oleh responden. Kampung Deer dan Mikiran mencatat nilai keterikatan yang relatif tinggi masing-masing sekitar 4,04 dan 4,03, diikuti oleh Dibalal sekitar 3,93, sementara Tolobi memiliki nilai yang sedikit lebih rendah yaitu sekitar 3,88. Tingginya keterikatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lamanya masyarakat tinggal di wilayah tersebut, terutama bagi masyarakat asli seperti Suku Beteuw, serta keterkaitan aktivitas ekonomi dengan laut seperti kegiatan melaut. Selain itu, keberadaan penduduk pendatang yang bekerja sebagai pedagang, guru, atau aparatur pemerintah serta perkembangan akses keluar kampung dan teknologi komunikasi seperti internet juga turut mempengaruhi tingkat keterikatan masyarakat terhadap wilayah perairan laut di sekitar mereka.



Gambar 9. Status dan Tren Keterikatan Tempat oleh Rumah Tangga

Perbandingan data antar tahun pemantauan menunjukkan bahwa tingkat keterikatan emosional responden terhadap wilayah perairan laut di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo relatif stabil dan tetap tinggi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, nilai indeks keterikatan tercatat sekitar 4,11, kemudian sedikit menurun pada tahun 2013 menjadi sekitar 3,95 dan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi sekitar 4,00. Pada tahun 2018, nilai indeks meningkat menjadi sekitar 4,17, dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 yaitu sekitar 4,32. Pada tahun 2025, nilai indeks sedikit menurun menjadi sekitar 3,96, namun masih berada pada kategori keterikatan yang tinggi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah laut di sekitar kampung mereka, yang kemungkinan dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap sumber daya laut sebagai bagian dari mata pencaharian, identitas sosial, serta keterikatan budaya masyarakat pesisir terhadap wilayah perairan di sekitarnya.

Status dan Tren: Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi yang digunakan dalam kajian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pekerjaan utama dan aset rumah tangga. Pekerjaan utama mengacu pada cara utama yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan utama ini digolongkan dalam lima kategori, yakni: bertani, yang meliputi budidaya tanaman atau beternak; mengambil hasil hutan, yang mencakup hasil hutan kayu dan non-kayu (sayur, buah-buahan, obat-obatan, kulit kayu, tali hutan, rotan, protein dari hewan); melaut, yang mencakup kegiatan menangkap ikan, krustasea, dan sumber daya lainnya, baik untuk dijual maupun untuk konsumsi sendiri; pekerjaan yang menghasilkan upah lainnya, seperti guru, tenaga kesehatan, pekerja kehutanan, pekerja tambang, dan lainnya; serta kategori lainnya, yang mencakup pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti menukar jasa atau barang.

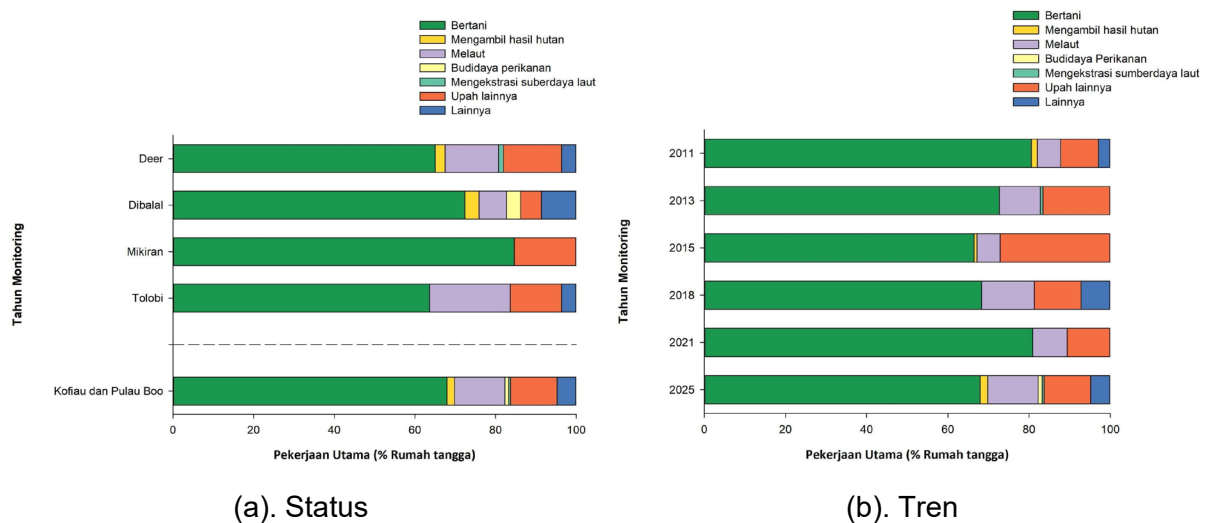
Sementara itu, aset rumah tangga dalam kajian ini didefinisikan sebagai materi yang secara fisik dimiliki oleh rumah tangga dan masih dalam kondisi berfungsi dengan baik. Aset-aset yang dimiliki rumah tangga di wilayah yang disurvei antara lain adalah radio, stereo, CD player, DVD player, TV, parabola, telepon (baik ponsel maupun telepon kabel), generator, perahu motor tanpa mesin, perahu motor mesin luar, perahu motor mesin dalam, sepeda, sepeda motor, serta mobil atau truk.

Pekerjaan Utama

Pada semua kampung yang disurvei tahun 2025, struktur mata pencaharian di wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo didominasi oleh kegiatan pertanian atau berkebun (74%), yang menjadi pekerjaan utama bagi sebagian besar rumah tangga. Proporsi rumah tangga yang bekerja sebagai petani tercatat cukup tinggi, terutama di Mikiran (84,62%), diikuti oleh Dibalal (72,41%), Deer (65,06%), dan Tolobi (63,64%). Selain bertani, sebagian rumah tangga juga menjadikan kegiatan melaut sebagai sumber penghidupan (9,16%), terutama di Tolobi (20%), Deer (13,25%), dan Dibalal (6,90%), baik sebagai nelayan maupun sebagai penadah atau pengumpul ikan hidup yang kemudian disalurkan ke pasar. Sebagian rumah tangga lainnya bekerja sebagai buruh atau menerima upah tetap (13,51%), seperti aparat pemerintah di distrik dan kampung, tenaga kesehatan dan guru. Selain itu, terdapat pula kegiatan ekonomi lain dalam skala kecil seperti perdagangan eceran di tingkat kampung, budidaya perikanan melalui keramba, serta kegiatan pengambilan pasir laut untuk kebutuhan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strategi penghidupan yang cukup beragam, meskipun sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga.

Kegiatan pertanian atau berkebun masyarakat umumnya dilakukan melalui sistem kebun campuran (*mixed garden*) dengan luas rata-rata sekitar 0,8–1 hektar per rumah tangga, dan sebagian rumah tangga memiliki lebih dari satu kebun. Tanaman pangan utama yang umum dibudidayakan meliputi ubi-ubian (singkong, keladi, ubi jalar) dan pisang, yang sebagian besar dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga menanam berbagai tanaman perkebunan, di mana kelapa menjadi komoditi yang paling dominan dan umumnya

diolah menjadi kopra sebagai sumber pendapatan penting bagi rumah tangga. Beberapa komoditi perkebunan lain seperti pala dan kakao juga ditemukan dalam skala yang lebih kecil. Selain kegiatan berkebun, sebagian rumah tangga masih memanfaatkan sumber daya hutan dan alam sekitar, seperti mengambil bahan obat tradisional dari tumbuhan hutan atau berburu hewan liar dalam skala terbatas. Namun demikian, aktivitas ini relatif kecil dibandingkan kegiatan pertanian dan perikanan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan berkebun dan pemanfaatan sumber daya alam darat tetap menjadi bagian penting dalam sistem penghidupan masyarakat di wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo.



Gambar 10. Status dan Tren Pekerjaan Utama Rumah Tangga

Analisis tren sejak tahun dasar 2011 hingga 2025 menunjukkan bahwa struktur pekerjaan utama rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo secara konsisten didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2011, sekitar 80,58% rumah tangga bekerja sebagai petani, kemudian menurun pada tahun 2013 (72,66%) dan 2015 (66,43%), sebelum kembali meningkat pada tahun 2018 (68,35%) dan mencapai sekitar 80,95% pada tahun 2021. Pada tahun 2025, proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian tercatat sekitar 67,94%, yang tetap menunjukkan bahwa kegiatan bertani menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Sementara itu, pekerjaan sebagai nelayan cenderung berfluktuasi dari sekitar 5,76% pada tahun 2011 menjadi 12,95% pada tahun 2018, dan berada pada kisaran 12,44% pada tahun 2025. Pekerjaan sebagai buruh atau upah lainnya juga menunjukkan perubahan, dengan peningkatan pada tahun 2015 (27,14%) sebelum kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, sebagian kecil rumah tangga juga terlibat dalam kegiatan lain seperti pengambilan hasil hutan, budidaya perikanan, serta kegiatan ekonomi lainnya, meskipun kontribusinya relatif kecil. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga, sementara kegiatan melaut dan pekerjaan lainnya berperan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi sebagian masyarakat.



Kelapa menjadi komoditas perkebunan yang paling banyak dibudidayakan masyarakat di KKP Kepulauan Kofiau-Boo
(Foto: Arnoldus S. Ananta/S4C LPPM UNIPA)



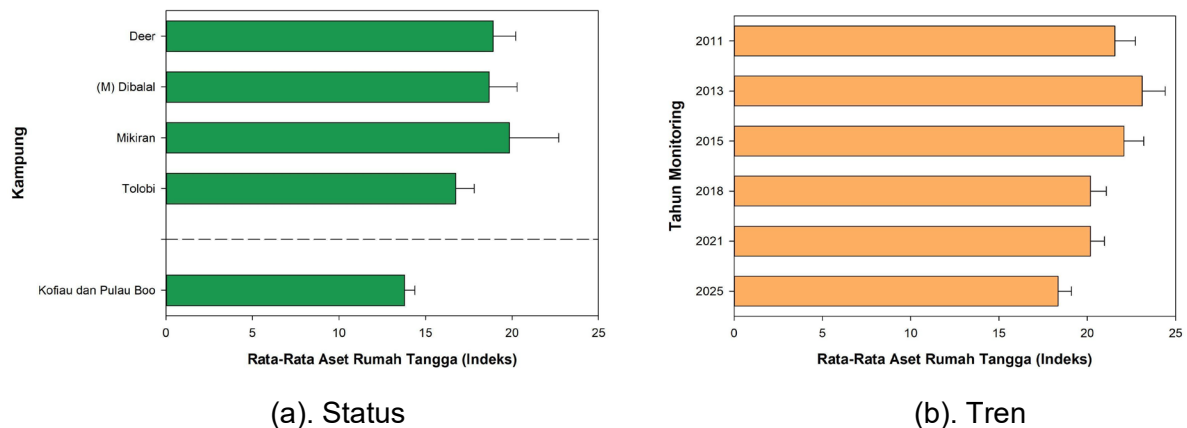
Kopra menjadi produk unggulan sekaligus sumber penghasilan utama banyak rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo, dengan pemasaran hingga ke luar wilayah Papua (Foto: Jeniffer A. Maleke/S4C LPPM UNIPA)



Kopra umumnya dipasarkan langsung di kampung melalui kapal pembeli yang berpindah dari kampung ke kampung, dan tujuan pasar utama adalah wilayah Halmahera (Foto: Agustinus Aiwor/S4C LPPM UNIPA)

Aset Rumah Tangga

Hasil analisis data tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata indeks kepemilikan aset rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan nilai rata-rata kawasan sekitar 14–15. Variasi antar kampung terlihat pada nilai indeks aset yang dimiliki rumah tangga. Kampung Mikiran mencatat nilai indeks aset tertinggi yaitu sekitar 19,85, diikuti oleh Deer sekitar 18,92 dan Dibalal sekitar 18,67, sementara Tolobi memiliki nilai yang lebih rendah yaitu sekitar 16,75. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki sejumlah aset dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Aset yang paling umum dimiliki rumah tangga antara lain perahu sampan atau perahu dayung, perahu dengan mesin tempel, serta beberapa peralatan rumah tangga seperti handphone dan genset. Secara umum, kepemilikan aset tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sarana dasar yang mendukung aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kegiatan melaut, mobilitas antar pulau, serta kebutuhan komunikasi dan energi rumah tangga.



Gambar 11. Status dan Tren Rata-Rata Kepemilikan Aset Rumah Tangga

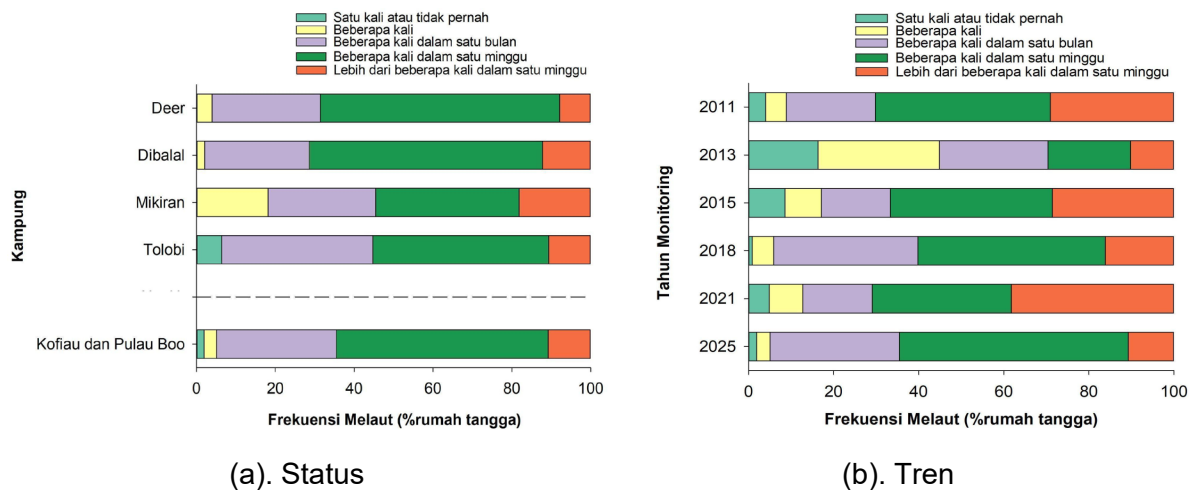
Perubahan kondisi dari tahun 2011 hingga 2025 menunjukkan bahwa rata-rata indeks kepemilikan aset rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2011, nilai indeks aset tercatat sekitar 21,55, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi sekitar 23,10, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode pemantauan. Setelah itu, nilai indeks mulai menurun pada tahun 2015 menjadi sekitar 22,07, dan kembali menurun pada tahun 2018 (20,18) serta tahun 2021 (20,17). Pada tahun 2025, nilai indeks tercatat sekitar 18,34, yang menunjukkan penurunan lebih lanjut dibandingkan periode sebelumnya. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset rumah tangga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya penambahan aset baru, kerusakan atau usia pakai aset yang sudah lama, serta keterbatasan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mengganti atau menambah aset yang dimiliki.

Status dan Tren: Penggunaan Sumberdaya Laut

Frekuensi Melaut

Secara umum, frekuensi melaut rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo pada tahun 2025 umumnya berada pada kategori beberapa kali dalam satu minggu, yang menunjukkan bahwa aktivitas melaut masih menjadi kegiatan rutin bagi sebagian rumah tangga. Kampung Deer dan Dibalal menunjukkan proporsi tertinggi pada kategori ini masing-masing sekitar 60,78% dan 59,18%, diikuti oleh Tolobi (44,68%) dan Mikiran (36,36%). Selain itu, sebagian rumah tangga juga melaut beberapa kali dalam satu bulan, terutama di Tolobi (38,30%), Mikiran (27,27%), Deer (27,45%), dan Dibalal (26,53%). Aktivitas melaut dengan intensitas lebih tinggi yaitu lebih dari beberapa kali dalam satu minggu juga ditemukan pada sebagian kecil rumah tangga, sementara rumah tangga yang jarang melaut relatif sedikit. Pola ini menunjukkan bahwa kegiatan melaut tetap menjadi bagian penting dari strategi penghidupan rumah tangga, meskipun intensitasnya tidak selalu dilakukan setiap hari. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi lain seperti pengolahan kopra, di mana pada periode tertentu masyarakat lebih banyak mengalokasikan waktu untuk berkebun dan produksi kopra.

Aktivitas melaut masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca di wilayah perairan Kofiau. Berdasarkan informasi dari responden, musim ombak atau angin umumnya terjadi pada bulan Desember–Februari serta April–Mei, sehingga pada periode tersebut nelayan biasanya mengurangi aktivitas melaut jauh dari kampung dan hanya memancing di perairan sekitar kampung. Sebaliknya, pada periode laut yang relatif tenang atau teduh, terutama pada bulan Juni–Oktober, frekuensi melaut cenderung meningkat karena kondisi perairan lebih aman. Pada musim ini hasil tangkapan biasanya lebih banyak dan aktivitas penjualan ikan juga meningkat. Jenis hasil tangkapan yang umum diperoleh masyarakat meliputi ikan pelagis seperti cakalang, tenggiri, ekor kuning, dan oci, serta ikan karang atau ikan dasar seperti kerapu, kakap, bubara, dan geropa. Selain itu, sebagian nelayan juga memanfaatkan sumber daya laut lain seperti teripang, lola, lobster, gurita, dan hiu sesuai dengan musim dan ketersediaan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas melaut masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, kondisi cuaca, serta ketersediaan sumber daya laut di perairan sekitar kampung.



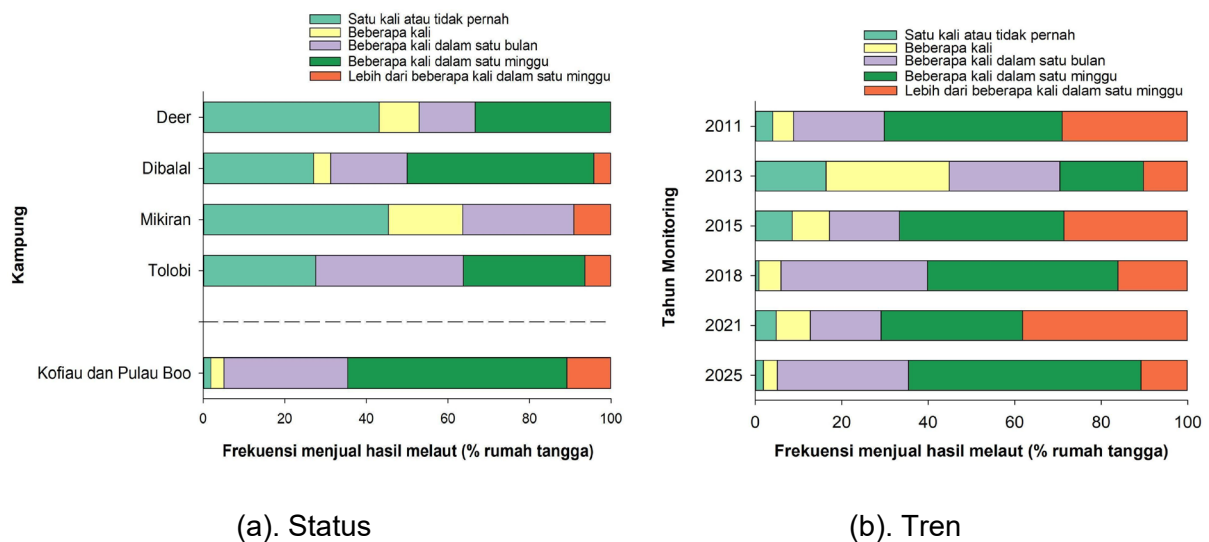
Gambar 12. Status dan Tren Frekuensi Melaut

Analisis tren sejak tahun dasar 2011 hingga 2025 menunjukkan bahwa frekuensi melaut rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo mengalami perubahan yang cukup dinamis. Pada tahun 2011, sebagian besar rumah tangga melaut beberapa kali dalam satu minggu (41,13%), diikuti oleh kategori lebih dari beberapa kali dalam satu minggu (29,03%), yang menunjukkan aktivitas melaut yang cukup intensif pada periode tersebut. Pada tahun 2013, intensitas melaut cenderung menurun, dengan meningkatnya proporsi rumah tangga yang hanya melaut beberapa kali dalam enam bulan (28,57%) atau beberapa kali dalam satu bulan (25,51%). Pada tahun 2015 dan 2018, aktivitas melaut kembali meningkat dengan dominasi kategori beberapa kali dalam satu minggu, masing-masing sekitar 38,10% dan 44,07%. Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga yang melaut lebih dari beberapa kali dalam satu minggu meningkat cukup tinggi hingga sekitar 38,18%, sebelum kembali menurun pada tahun 2025 menjadi sekitar 10,76%. Pada tahun 2025, frekuensi melaut kembali didominasi oleh kategori beberapa kali dalam satu minggu (53,80%) dan beberapa kali dalam satu bulan (30,38%). Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa aktivitas melaut masyarakat bersifat fluktuatif dan sering menyesuaikan dengan kegiatan ekonomi lainnya, seperti musim produksi kopra, di mana sebagian masyarakat lebih fokus pada kegiatan berkebun dan pengolahan kopra sehingga frekuensi melaut tidak dilakukan setiap hari.

Frekuensi Menjual Ikan

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, frekuensi rumah tangga dalam menjual hasil tangkapan ikan di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan variasi antar kampung. Sebagian rumah tangga menjual hasil tangkapan beberapa kali dalam satu minggu, terutama di Dibalal (45,83%), Deer (33,33%), dan Tolobi (29,79%). Namun demikian, terdapat pula rumah tangga yang jarang atau hampir tidak pernah menjual hasil tangkapan, terutama di Mikiran (45,45%) dan Deer (43,14%), yang menunjukkan bahwa sebagian hasil tangkapan masih dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Aktivitas penjualan ikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan penadah atau pengepul di tingkat kampung, seperti di Deer, Dibalal, dan

Tolobi, sehingga penjualan umumnya dilakukan ketika terdapat pembeli. Sebagian besar transaksi hasil laut berlangsung di tingkat kampung melalui kios atau penadah hasil laut, sementara pasar regional utama yang menjadi tujuan pemasaran adalah Kota Sorong. Di Deer, misalnya, terdapat nelayan yang menangkap ikan hiu untuk diambil siripnya yang kemudian dijual ke Sorong, sementara sebagian masyarakat juga mengolah hasil tangkapan menjadi ikan garam (ikan asin) sebelum dipasarkan. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan hasil laut masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh akses pasar, keberadaan pengepul, serta jaringan perdagangan yang menghubungkan kampung dengan pasar regional.



Gambar 13. Status dan Tren Frekuensi Menjual Ikan

Tren frekuensi rumah tangga dalam menjual hasil tangkapan laut di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan perubahan yang cukup jelas selama periode 2011–2025. Pada tahun-tahun awal pemantauan, sebagian besar rumah tangga jarang atau hampir tidak pernah menjual hasil tangkapan, misalnya sebesar 58,06% pada 2011 dan meningkat hingga 75,89% pada 2018. Namun sejak tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya peningkatan rumah tangga yang lebih aktif menjual hasil tangkapan, terutama pada kategori beberapa kali dalam satu minggu, yang meningkat dari 21,52% pada 2021 menjadi 33,76% pada 2025. Pada saat yang sama, proporsi rumah tangga yang hampir tidak pernah menjual hasil tangkapan menurun menjadi 33,76% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan hasil laut mulai meningkat seiring dengan berkembangnya akses pasar dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perikanan. Secara umum, tren ini menggambarkan adanya pergeseran dari pemanfaatan hasil tangkapan untuk konsumsi rumah tangga menuju aktivitas penjualan yang lebih rutin.



Masyarakat pesisir di KKP Kepulauan Kofiau-Boo memanfaatkan perairan sekitar kampung untuk melaut/mancing menggunakan perahu dayung serta alat tangkap sederhana (Foto: Arnoldus S. Ananta/S4C LPPM UNIPA)



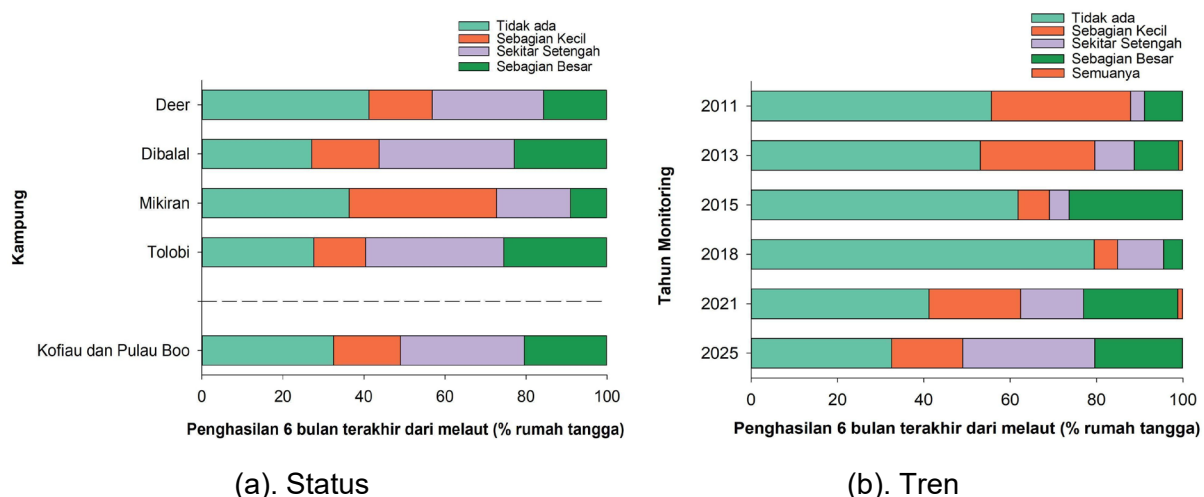
Kapal jolor berkeliling dari kampung ke kampung sebagai penampung hasil tangkapan ikan yang dibeli langsung dari masyarakat pesisir (Foto: Arnoldus S. Ananta/S4C LPPM UNIPA)



Keramba jaring apung sederhana dibuat masyarakat sebagai tempat penampungan ikan hidup (seperti Ikan Kerapu), sebelum dijual kepada pembeli atau dipasarkan ke luar kampung (Foto: Jeniffer A. Maleke/S4C LPPM UNIPA)

Penghasilan Penangkapan Ikan

Gambaran kondisi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kontribusi penghasilan dari kegiatan melaut terhadap pendapatan rumah tangga di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan variasi antar kampung. Di beberapa kampung, sebagian rumah tangga menyatakan bahwa sekitar setengah dari penghasilan mereka berasal dari melaut, seperti di Tolobi (34,04%), Dibalal (33,33%), dan Deer (27,45%). Selain itu, terdapat pula rumah tangga yang memperoleh sebagian besar penghasilan dari melaut, terutama di Tolobi (25,53%) dan Dibalal (22,92%). Namun demikian, proporsi rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari melaut juga masih cukup tinggi, terutama di Deer (41,18%) dan Mikiran (36,36%), yang menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga lebih bergantung pada sumber penghasilan lain. Di Mikiran, misalnya, sebagian rumah tangga menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil penghasilan berasal dari melaut, sementara kegiatan ekonomi lainnya seperti berkebun kelapa untuk produksi kopra, berdagang, atau pekerjaan lain menjadi sumber pendapatan tambahan. Jenis tangkapan yang umumnya memberikan nilai ekonomi bagi rumah tangga antara lain cakalang, goropa, gutila, tenggiri, kakap, bobara, lobster, teripang, serta hiu (sirip). Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan melaut masih menjadi sumber penghasilan penting bagi sebagian masyarakat, struktur penghidupan rumah tangga di wilayah ini tetap bersifat beragam dengan kombinasi kegiatan perikanan, pertanian, dan aktivitas ekonomi lainnya.



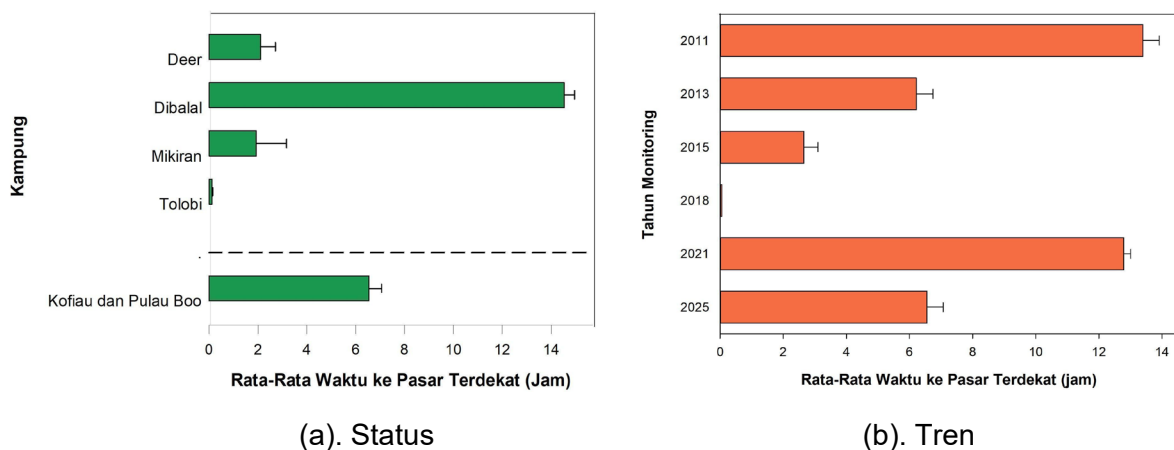
Gambar 14. Status dan Tren Penghasilan Penangkapan Ikan

Tren kontribusi penghasilan rumah tangga dari kegiatan melaut di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan perubahan selama periode 2011–2025. Pada tahun-tahun awal pemantauan, sebagian besar rumah tangga menyatakan bahwa tidak ada penghasilan dari melaut, yaitu sekitar 55,65% pada 2011, 53,06% pada 2013, dan meningkat hingga 79,46% pada 2018. Namun sejak tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya penurunan pada kategori tersebut menjadi 41,21% pada 2021 dan 32,48% pada 2025, yang menunjukkan semakin banyak rumah tangga memperoleh penghasilan dari kegiatan melaut. Pada saat yang sama,

proporsi rumah tangga yang memperoleh sekitar setengah penghasilan dari melaut meningkat cukup signifikan hingga 30,57% pada 2025. Rumah tangga yang memperoleh sebagian besar penghasilan dari melaut juga relatif meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa kegiatan melaut mulai kembali menjadi sumber penghasilan yang lebih penting bagi sebagian rumah tangga di wilayah ini.

Akses ke Pasar

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, rata-rata waktu yang dibutuhkan rumah tangga untuk mencapai pasar utama terdekat di wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo menunjukkan perbedaan antar kampung. Kampung Dibalal memiliki waktu tempuh yang paling lama, yaitu sekitar 14,54 jam, karena masyarakat umumnya harus menjangkau pasar yang lebih besar seperti di Sorong dan Halmahera untuk membeli kebutuhan maupun menjual hasil produksi (terutama kopra). Sementara itu, waktu tempuh menuju pasar utama di Deer (2,10 jam) dan Mikiran (1,93 jam) relatif lebih singkat. Di Tolobi, waktu yang dibutuhkan bahkan sangat dekat yaitu sekitar 0,13 jam, karena masyarakat dapat mengakses tempat jual beli yang berada di sekitar kampung. Secara umum, sebagian besar transaksi kebutuhan sehari-hari masyarakat dilakukan melalui kios atau pasar kecil yang berada di dalam kampung. Untuk mengakses pasar di luar kampung, masyarakat biasanya menggunakan transportasi laut seperti kapal (termasuk kapal perintis), perahu longboat, maupun jolor. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses ke pasar utama masih cukup terbatas bagi beberapa kampung sehingga masyarakat masih banyak bergantung pada pasar lokal atau kios yang tersedia di tingkat kampung.



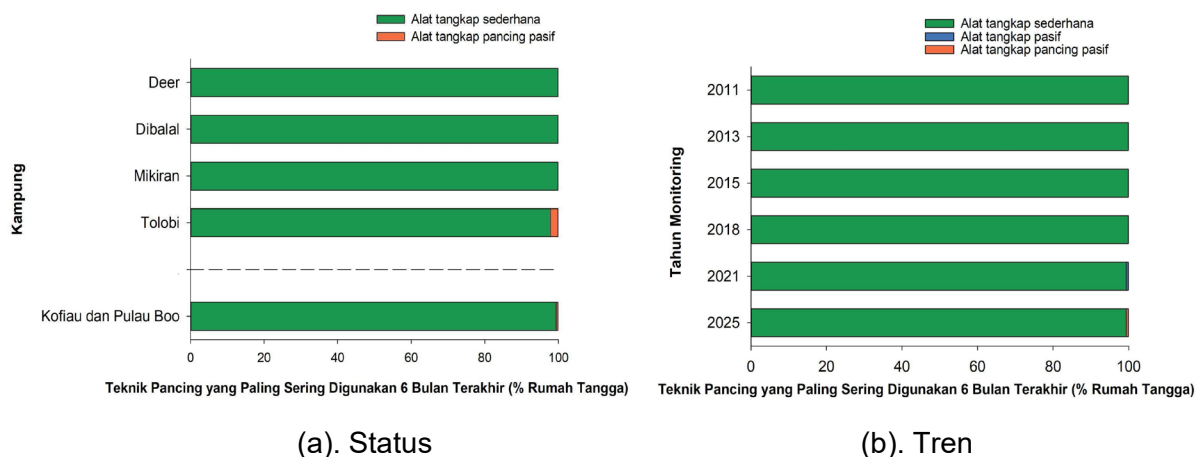
Gambar 15. Status dan Tren Rata-rata Waktu Tempuh ke Pasar Utama

Tren rata-rata waktu yang dibutuhkan rumah tangga untuk mencapai pasar utama terdekat di wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo menunjukkan fluktuasi selama periode 2011–2025. Pada tahun 2011, waktu tempuh rata-rata mencapai sekitar 13,39 jam, kemudian menurun menjadi 6,21 jam pada 2013 dan 2,65 jam pada 2015, yang menunjukkan akses pasar yang relatif lebih dekat pada periode tersebut. Pada 2018, waktu tempuh tercatat sangat rendah yaitu

sekitar 0,05 jam, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar transaksi dilakukan di pasar atau kios yang berada di dalam kampung. Namun pada 2021, waktu tempuh kembali meningkat menjadi sekitar 12,79 jam, sebelum kembali menurun menjadi 6,55 jam pada 2025. Secara umum, perubahan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat ke pasar utama dapat berubah-ubah tergantung pada lokasi pasar yang digunakan serta keterbatasan transportasi dan jarak antar pulau. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa masyarakat sering memanfaatkan kios atau pasar kecil di dalam kampung sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Teknik Penangkapan Ikan

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar rumah tangga nelayan di KKP Kepulauan Kofiau-Boo menggunakan alat tangkap sederhana berupa pancing tangan (nelon dan kail) sebagai teknik utama dalam kegiatan melaut. Penggunaan teknik ini tercatat 100% di kampung Deer, Dibalal, dan Mikiran, sementara di Tolobi mencapai 97,87%. Hanya sebagian kecil rumah tangga di Tolobi (2,13%) yang menggunakan pancing pasif atau pancing statis. Selain itu, berdasarkan catatan lapangan, nelayan di Tolobi juga menggunakan beberapa alat tangkap lain seperti jaring, rawai (*long-line*), perangkap lobster, dan pancing hiu untuk menangkap jenis sumber daya laut tertentu. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan di wilayah ini masih didominasi oleh alat tangkap sederhana dan berskala kecil, meskipun terdapat variasi alat tangkap di beberapa kampung sesuai dengan jenis tangkapan yang dituju.



Gambar 16. Status dan Tren Teknik Pancing yang Digunakan Rumah Tangga

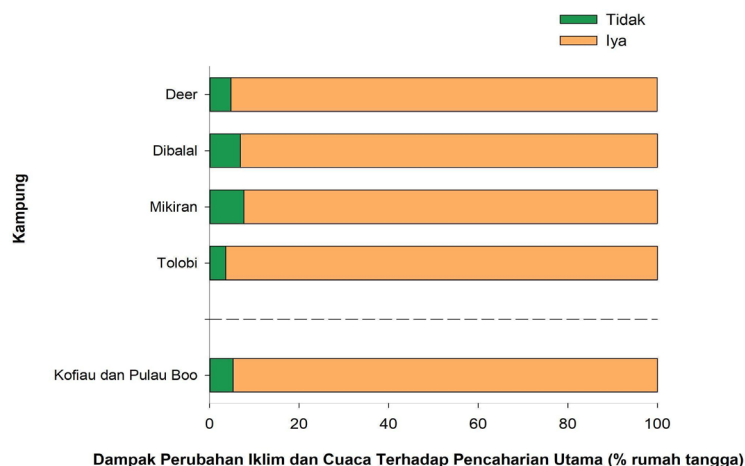
Tren penggunaan teknik penangkapan ikan oleh rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo selama periode 2011–2025 menunjukkan pola yang sangat stabil. Pada seluruh periode pemantauan, hampir seluruh rumah tangga nelayan menggunakan alat tangkap sederhana berupa pancing tangan, dengan persentase 100% pada tahun 2011–2018, kemudian 99,39% pada 2021 dan 99,37% pada 2025. Penggunaan alat tangkap lain seperti jaring statis atau

pancing statis hanya muncul dalam proporsi yang sangat kecil, yaitu 0,61% pada 2021 dan 0,63% pada 2025. Tidak ditemukan penggunaan jaring bergerak maupun pancing bergerak pada seluruh periode pemantauan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan oleh masyarakat masih didominasi oleh alat tangkap sederhana dan berskala kecil. Secara umum, tren ini menggambarkan bahwa teknik penangkapan tradisional tetap menjadi metode utama yang digunakan oleh rumah tangga nelayan di wilayah tersebut.

Status: Iklim dan Cuaca

Iklim dan Cuaca

Secara umum, sebagian besar rumah tangga di KKP Kepulauan Kofiau-Boo menyatakan bahwa perubahan iklim dan cuaca berdampak terhadap pencaharian utama mereka. Persentase responden yang merasakan dampak tersebut cukup tinggi di seluruh kampung, yaitu Mikiran (91,67%), Tolobi (90,38%), Dibalal (87,04%), dan Deer (85%). Hanya sebagian kecil rumah tangga yang menyatakan tidak merasakan dampak secara langsung. Berdasarkan catatan lapangan, masyarakat mengamati beberapa perubahan kondisi lingkungan seperti genangan air laut di kampung Deer (terjadi saat musim ombak), genangan air akibat hujan, serta badai yang semakin sering terjadi. Di kampung Dibalal, masyarakat juga melaporkan adanya abrasi pantai yang menyebabkan kerusakan pada tembok penahan ombak. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan cuaca mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat pesisir dan mempengaruhi aktivitas serta keberlanjutan mata pencaharian mereka.



Gambar 17. Status Dampak Perubahan Iklim dan Cuaca terhadap Pekerjaan Utama

Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan cuaca menjadi faktor penting yang mempengaruhi stabilitas mata pencaharian masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya adaptasi yang lebih kuat untuk membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian lingkungan yang semakin meningkat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain

melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan cuaca, penguatan akses terhadap informasi cuaca, serta pengembangan sumber penghidupan yang lebih beragam. Selain itu, dukungan terhadap infrastruktur pesisir yang lebih tahan terhadap perubahan iklim juga menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat. Upaya seperti restorasi mangrove dan terumbu karang serta pembangunan tanggul laut atau pemecah gelombang dapat membantu melindungi wilayah pesisir dari dampak perubahan lingkungan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi.



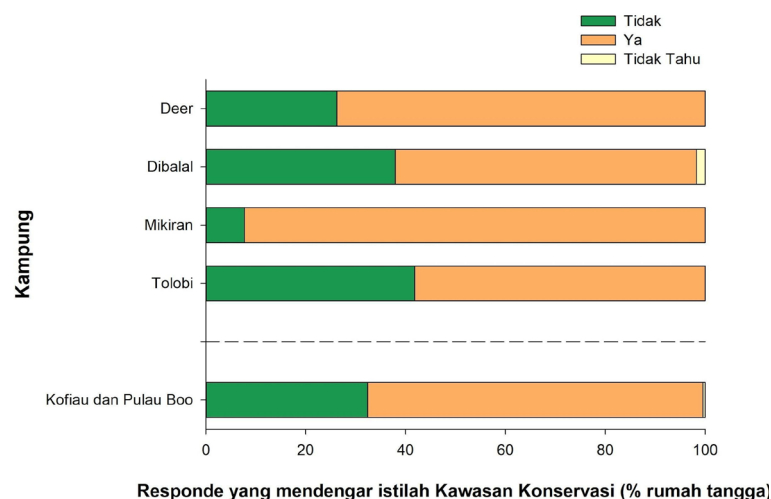
Kenaikan permukaan laut dan genangan pascahujan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat kampung-kampung pesisir di wilayah KKP Kepulauan Kofiau-Boo (Foto Atas: Agustinus Aiwor/S4C LPPM UNIPA; Foto Bawah: Arnoldus S. Ananta/S4C LPPM UNIPA)



Status: Kesadaran akan Peraturan Pelestarian Laut

Pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan serta keberlanjutan sumber daya laut. Tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana aturan pengelolaan dipahami, diterima, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, pemantauan sosial ekonomi juga mengkaji beberapa aspek terkait pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi, termasuk pengenalan istilah kawasan konservasi, pengetahuan mengenai peraturan penangkapan ikan, serta persepsi masyarakat tentang pengertian dan aturan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi. Selain itu, survei ini juga mengevaluasi persepsi masyarakat mengenai letak kampung mereka dalam kawasan konservasi. Informasi ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami keberadaan dan fungsi kawasan konservasi di wilayah mereka, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan sosialisasi atau peningkatan pemahaman masyarakat di masa mendatang.

Pengenalan Istilah Kawasan Konservasi

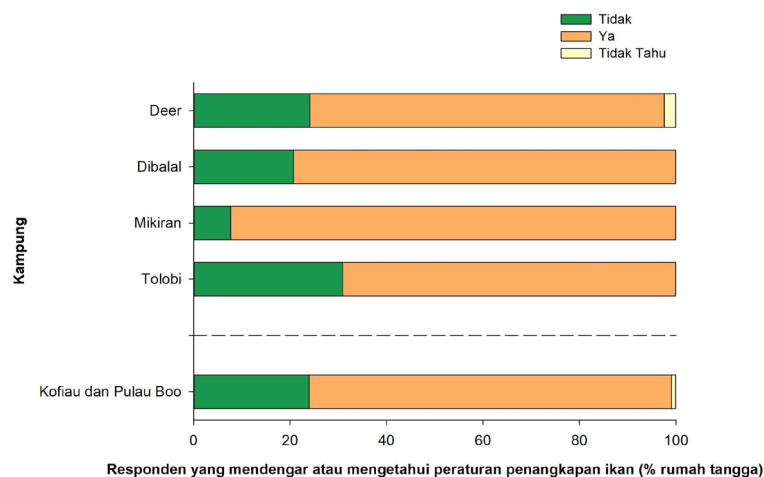


Gambar 18. Status Responden yang Mendengar Istilah Kawasan Konservasi

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar responden di KKP Kepulauan Kofiau-Boo telah mendengar istilah Kawasan Konservasi, dengan proporsi sekitar 67,14% pada tingkat kawasan. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dasar masyarakat terhadap konsep kawasan konservasi relatif cukup baik. Meskipun demikian, terdapat variasi antar kampung dalam nilai indikator ini. Kampung Mikiran (92,31%) menunjukkan nilai tertinggi, diikuti kampung Deer (73,81%). Sedangkan Kampung Dibalal (60,34%) dan Kampung Tolobi (58,18%) memiliki proporsi nilai relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dasar masyarakat terhadap konsep Kawasan Konservasi masih belum merata antar kampung di wilayah KKP Kepulauan

Kofiau-Boo. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh variasi akses informasi serta intensitas sosialisasi mengenai aturan formal kawasan konservasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (termasuk BLUD UPTD Kepulauan Raja Ampat) dan lembaga mitra konservasi. Selain itu, pemahaman masyarakat juga dipengaruhi oleh aturan informal atau sistem adat yang mengatur pemanfaatan wilayah laut di tingkat kampung maupun marga. Keterlibatan tenaga lokal dalam kegiatan patroli dan sosialisasi turut memperkuat penyebaran informasi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi yang mengintegrasikan aturan formal dan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan



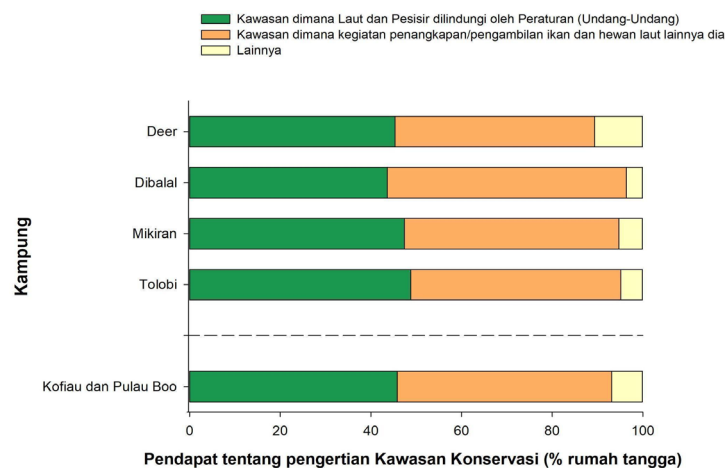
Gambar 19. Status Responden yang Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan

Hasil pemantauan di KKP Kepulauan Kofiau-Boo menunjukkan bahwa rata-rata 75,12% responden di tingkat kawasan menyatakan telah mendengar atau mengetahui peraturan penangkapan ikan, sementara 23,92% lainnya menyatakan belum mengetahui peraturan tersebut. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dasar masyarakat terhadap peraturan penangkapan ikan di kawasan konservasi relatif cukup baik. Meskipun demikian, terdapat variasi antar kampung dalam nilai indikator ini. Kampung Mikiran (92,31%) menunjukkan nilai tertinggi, diikuti kampung Dibalal (79,31%) dan kampung Deer (73,49%). Sedangkan kampung Tolobi (69,09%) memiliki proporsi nilai relatif rendah dibandingkan lokasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai peraturan penangkapan ikan di KKP Kepulauan Kofiau-Boo masih belum merata antar kampung. Selain aturan formal kawasan konservasi, masyarakat juga mengenal aturan informal atau ketentuan adat yang mengatur lokasi penangkapan, waktu pemanfaatan, serta jenis alat dan teknik penangkapan ikan yang diperbolehkan. Perbedaan pemahaman terhadap

kedua sistem aturan tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya sosialisasi perlu diperkuat, khususnya di kampung-kampung dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah, dengan mengintegrasikan aturan formal dan praktik lokal yang berlaku di masyarakat.

Pendapat tentang Pengertian Kawasan Konservasi

Secara umum, pemahaman masyarakat di KKP Kepulauan Kofiau–Boo terhadap kawasan konservasi didominasi oleh definisi sebagai wilayah dimana kegiatan penangkapan ikan dan biota laut lainnya diatur atau dibatasi, dengan proporsi rata-rata 47,37%. Sebanyak 45,79% responden memaknai kawasan konservasi sebagai wilayah laut dan pesisir yang dilindungi oleh peraturan, sedangkan 6,84% responden memberikan jawaban lainnya. Pada tingkat kampung, Dibalal menunjukkan proporsi tertinggi untuk pemahaman berbasis pengaturan pemanfaatan sumber daya (52,73%), sementara Tolobi tertinggi pada definisi sebagai kawasan yang dilindungi oleh peraturan (48,78%). Kampung Mikiran menunjukkan proporsi yang seimbang pada kedua definisi utama, sedangkan Deer memiliki variasi jawaban lainnya yang paling tinggi.

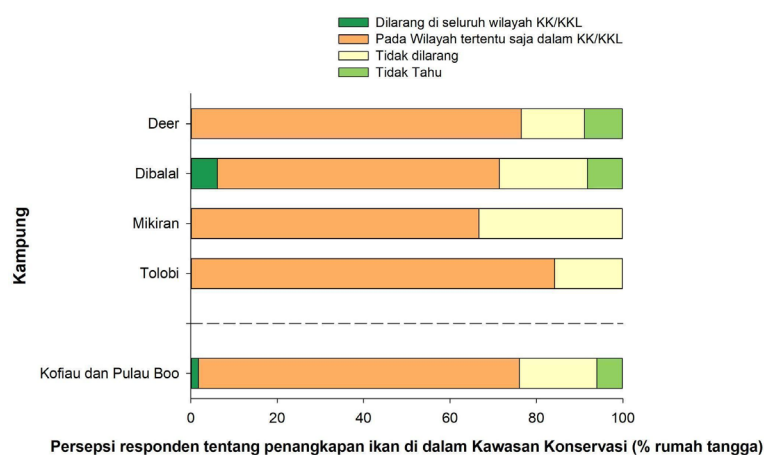


Gambar 20. Status Pendapat Responden tentang Pengertian Kawasan Konservasi

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat antar kampung masih bervariasi. Variasi ini diduga dipengaruhi oleh akses informasi, pengalaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan, serta intensitas sosialisasi yang diterima. Keterlibatan masyarakat dalam program konservasi bersama lembaga pengelola dan mitra juga berkontribusi terhadap kualitas pemahaman masyarakat mengenai kawasan konservasi. Secara umum, masyarakat yang lebih aktif terlibat cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep, tujuan, dan fungsi kawasan konservasi. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat masih diperlukan di seluruh wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo.

Pendapat tentang Penangkapan Ikan di KKP

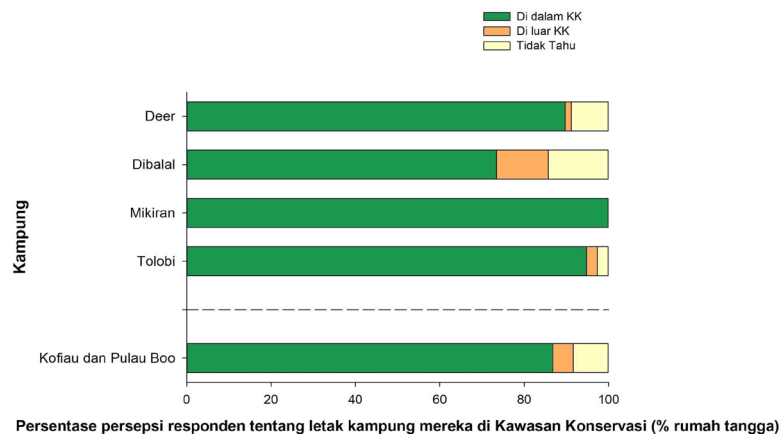
Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar responden di wilayah KKP Kepulauan Kofiau–Boo memahami bahwa kegiatan penangkapan ikan masih diperbolehkan pada zona atau wilayah tertentu di dalam kawasan konservasi. Persepsi tersebut disampaikan oleh 74,25% rumah tangga di tingkat kawasan. Sementara itu, sebanyak 17,96% responden menyatakan bahwa penangkapan ikan tidak dilarang, 1,79% berpendapat bahwa kegiatan tersebut dilarang di seluruh kawasan konservasi, dan 5,98% responden menyatakan tidak mengetahui ketentuan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan pemanfaatan sumber daya perikanan di dalam kawasan konservasi masih beragam antar responden maupun antar kampung.



Gambar 21. Status Persepsi Responden tentang Penangkapan Ikan di dalam Kawasan Konservasi

Variasi persepsi antar kampung masih terlihat, terutama di Deer dan Dibalal, dimana sebagian kecil responden menyatakan bahwa penangkapan ikan dilarang di seluruh kawasan atau belum mengetahui aturan yang berlaku. Perbedaan persepsi tersebut diduga berkaitan dengan praktik pengelolaan wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh sistem adat, termasuk pengaturan batas wilayah penangkapan berdasarkan kampung maupun marga. Selain itu, terdapat aturan informal yang mengatur waktu pemanfaatan, jenis alat tangkap, serta teknik penangkapan yang diperbolehkan menurut kesepakatan lokal. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai aturan penangkapan ikan masih dipengaruhi oleh interaksi antara ketentuan formal kawasan konservasi dan sistem pengelolaan laut berbasis adat di tingkat lokal.

Letak Kampung di KKP



Gambar 22. Status Persepsi Responden tentang Letak Kampung Mereka di Kawasan Konservasi

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar responden di wilayah KKP Kofiau memahami bahwa kampung mereka berada di dalam kawasan konservasi, dengan proporsi sekitar 86,83% rumah tangga di tingkat kawasan. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa kampung mereka berada di luar kawasan konservasi (4,79%) atau tidak mengetahui (8,39%). Pada tingkat kampung, pemahaman ini terlihat cukup kuat di Kampung Mikiran di mana seluruh responden menyatakan bahwa kampung mereka berada di dalam kawasan konservasi. Sementara itu, di kampung seperti Deer, Dibalal dan Tolobi masih terdapat sebagian kecil responden yang beranggapan bahwa kampung mereka berada di luar kawasan atau belum mengetahui secara pasti status wilayah tersebut. Perbedaan pemahaman ini dapat dipengaruhi oleh tingkat akses informasi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan. Secara umum, tingginya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai letak kampung mereka dalam kawasan konservasi juga berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola kawasan (BLUD UPTD Kepulauan Raja Ampat) serta beberapa lembaga swadaya masyarakat, yang secara rutin melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat di tingkat kampung. Upaya tersebut berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi kawasan konservasi di wilayah mereka.

Bagian III

Rekomendasi Kebijakan



Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan sosial ekonomi masyarakat di KKP Kepulauan Kofiau-Boo periode 2011–2025. Tujuannya adalah memberikan arah kebijakan pengelolaan kawasan yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1. Karakteristik Demografi

Pertumbuhan dan struktur penduduk yang didominasi kelompok usia muda perlu direspons melalui kebijakan pembangunan sumber daya manusia di tingkat kampung. Pemerataan akses pendidikan menengah, pelatihan keterampilan kerja, dan peningkatan layanan kesehatan dasar menjadi prioritas penting. Selain itu, pembaruan data kependudukan secara berkala diperlukan sebagai dasar perencanaan program konservasi dan pembangunan sosial ekonomi yang lebih tepat sasaran.

2. Indikator Sosial

Penurunan kondisi ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan perlunya intervensi melalui penguatan produksi pangan lokal, pengembangan kebun keluarga, serta peningkatan distribusi bahan pangan antar pulau. Layanan kesehatan dasar, termasuk puskesmas keliling dan penyediaan tenaga medis, perlu diperkuat terutama di kampung dengan tingkat keluhan kesehatan lebih tinggi. Pengakuan terhadap hak kelola laut berbasis adat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu terus didorong agar tata kelola kawasan berjalan adil dan efektif. Tingginya keterikatan masyarakat terhadap laut juga perlu dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam mendukung program konservasi.

3. Karakteristik Ekonomi

Meskipun sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama, diversifikasi ekonomi rumah tangga perlu diperluas melalui pengembangan usaha perikanan bernilai tambah, perdagangan lokal, jasa transportasi, dan ekowisata berbasis masyarakat. Penurunan kepemilikan aset rumah tangga menunjukkan perlunya dukungan berupa akses pembiayaan mikro, bantuan sarana produksi ramah lingkungan, dan penguatan usaha kecil masyarakat. Kebijakan ekonomi kawasan perlu diarahkan pada pembangunan ekonomi lokal yang inklusif serta selaras dengan prinsip konservasi.

4. Penggunaan Sumber Daya Laut

Aktivitas melaut masih menjadi sumber pendapatan penting bagi sebagian rumah tangga, sehingga pengelolaan perikanan berkelanjutan perlu diperkuat melalui pengawasan pemanfaatan sumber daya, pendampingan alat tangkap ramah lingkungan, dan peningkatan rantai nilai hasil tangkapan. Akses pasar hasil perikanan juga perlu

ditingkatkan melalui dukungan transportasi laut, fasilitas penyimpanan dingin, dan kemitraan pemasaran dengan pembeli regional. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa meningkatkan tekanan terhadap sumber daya laut.

5. Adaptasi Perubahan Iklim dan Cuaca

Tingginya persepsi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca menunjukkan perlunya strategi adaptasi di tingkat kawasan. Prioritas kebijakan meliputi penyediaan informasi cuaca yang mudah diakses nelayan, penguatan infrastruktur pesisir, rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, serta pengembangan sumber penghidupan alternatif pada musim gelombang tinggi. Langkah ini penting untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat pesisir terhadap risiko iklim dan cuaca.

6. Penguatan Tata Kelola Kawasan Konservasi

Meskipun pengetahuan masyarakat terhadap kawasan konservasi cukup baik, pemahaman antar kampung masih belum merata. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai zonasi, aturan pemanfaatan, dan tujuan konservasi perlu dilakukan secara berkala dengan pendekatan yang sesuai konteks lokal. Keterlibatan pemerintah kampung, tokoh adat, kelompok perempuan, pemuda, dan nelayan perlu diperkuat agar pengelolaan kawasan menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G. R., & Erdmann, M. V. (2009). *Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, Papua, Indonesia*. Check List, 5(3), 587–628. <https://doi.org/10.15560/5.3.587>
- Allen, G. R., & Erdmann, M. V. (2012). *Reef fishes of the East Indies* (Vols. 1–3). Perth, Australia: University of Hawai'i Press.
- Allen, G. R., Erdmann, M. V., & Munday, P. L. (2003). *Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, West Papua, Indonesia*. *Aquarium Sciences and Conservation*, 5(1), 1–28. <https://doi.org/10.1023/A:1025337819823>
- Bickel, G., Nord, M., Price, C., Hamilton, W., & Cook, J. (2000). *Guide to Measuring Household Food Security, Revised 2000*. Alexandria, VA: U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. (<https://www.fns.usda.gov/guide-measuring-household-food-security-revised-2000>)
- BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat (Website: <https://kkprajaampat.com/blud-uptd/> ; April 2026)
- Casey, P. H., Szeto, K. L., Robbins, J. M., Stuff, J. E., Connell, C., Gossett, J. M., & Simpson, P. M. (2005). Child health-related quality of life and household food security. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 159(1), 51–56. <https://doi.org/10.1001/archpedi.159.1.51>
- Cinner, J. E. (2005). Socioeconomic factors influencing customary marine tenure in the Indo-Pacific. *Ecology and Society*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.5751/ES-01230-100136>
- Conservation International. (2021). *Bird's Head Seascape: A Global Priority for Marine Conservation*. Retrieved from <https://www.conservation.org/>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2017). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Konservasi Kofiau-Boo Tahun 2018–2027*. Jakarta: KLHK.
- Erdmann, M. V., & Allen, G. R. (2009). *A rapid marine biodiversity assessment of the Bird's Head Seascape, West Papua, Indonesia*. RAP Bulletin of Biological Assessment No. 20. Arlington, VA: Conservation International.
- Glew, L., M.B. Mascia and F. Pakiding. (2012). Solving the Mystery of MPA Performance: monitoring social impacts. Field Manual (version 1.0). World Wildlife Fund and Universitas Negeri Papua, Washington D.C. and Manokwari, Indonesia.
- Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2015. *Ethnologue: Languages of the World*, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online: <http://www.ethnologue.com>.
- Martorell, R. (1995). Results and implications of the INCAP follow-up study. *Journal of Nutrition*, 125(4 Suppl), 1127S–1138S. https://doi.org/10.1093/jn/125.suppl_4.1127S
- United Nations Development Programme (UNDP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, & Commission of the European Communities. (1990). *Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation*. OECD/DAC Expert Group on Aid Evaluation.
- Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. *Forest Science*, 49(6), 830–840.

